

Transformasi Ekonomi Indonesia: Keluar Dari Middle Income Trap (MIT) Menuju Indonesia Emas 2045 (Refleksi 2005-2025 dan Visi 2025-2045)

Sidqy Lego Pangesthi Suyitno¹

¹ Kedeputian Ekonomi, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Korespondensi: * sidqy@bappenas.go.id

 <https://doi.org/10.47266/bwp.v6i3.237> | halaman: 392 - 419

Dikirim: 29-11-2023 | Diterima: 30-11-2023 | Dipublikasikan: 30-11-2023

Abstrak

Makalah ini melakukan evaluasi dan refleksi terhadap pembangunan ekonomi Indonesia dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 serta memberikan visi mengenai pembangunan ekonomi Indonesia periode RPJP 2025-2045. Dalam refleksi ditunjukkan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi Indonesia; PDB per kapita dan kualitas pertumbuhan ekonomi; stabilitas moneter dan keuangan; ketahanan dan keberlanjutan fiskal serta rasio pajak; dan daya saing, peran manufaktur dan produktivitas. Disimpulkan bahwa kinerja ekonomi Indonesia cukup baik, namun masih menghadapi tantangan untuk dapat keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (*middle income trap*). Dalam bagian Visi 2025-2045: Transformasi ekonomi untuk keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah direkomendasikan beberapa strategi, di antaranya mengenai pengembangan inovasi domestik, hilirisasi industri, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta perluasan pendidikan di bidang STEAM (*science, technology, engineering, arts, mathematics*).

Kata kunci: transformasi ekonomi; *middle income trap* (MIT); Indonesia Emas.

I. Pendahuluan

Pembangunan merupakan suatu transformasi masyarakat dalam arti luas, suatu gerakan perubahan dari hubungan dan cara berpikir tradisional, cara-cara tradisional dalam menangani kesehatan dan pendidikan, serta metode tradisional dalam memproduksi ke arah cara-cara yang lebih modern, antara lain dalam mengurangi kematian bayi, menaikkan usia harapan hidup, dan meningkatkan produktivitas.¹ Partisipasi dan kepemilikan (*ownership*) adalah bagian esensial dari kesuksesan pembangunan; sedangkan partisipasi yang efektif dalam pembuatan keputusan pembangunan memerlukan transparansi.² Transformasi masyarakat secara luas mencakup hampir seluruh aspek kehidupan, seperti sosial dan budaya, ekonomi, politik dan tata kelola, pertahanan dan keamanan, lingkungan hidup, dan sebagainya.

Salah satu kajian Bank Dunia menunjukkan bahwa proyek dengan tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi ternyata akan lebih berhasil (68 persen) dibandingkan dengan yang partisipasinya tidak/kurang ada (tingkat keberhasilan 12 persen) antara lain dikarenakan proyek tersebut lebih sedikit membuat kesalahan asumsi tentang kebutuhan dan kemampuan masyarakat penerima manfaat.³ Oleh karena itu partisipasi atau keterlibatan masyarakat menjadi salah satu dari lima proses utama dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (empat proses lainnya adalah proses politik, teknokratik, dari bawah ke atas, dan dari atas ke bawah) melalui musyawarah yang dilaksanakan dari tingkat Nasional, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan, hingga Desa.^{[4][5]} Perencanaan dan juga pelaksanaan pembangunan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan atau praktis seluruh unsur masyarakat untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Konsep pendekatan partisipatif tersebut telah diadopsi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2024 dan salah satu tujuan ditetapkannya melalui undang-undang adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.⁶

Di dalam RPJPN 2005-2025, pembangunan ekonomi termasuk di dalam misi kedua (dari delapan misi), yaitu mewujudkan bangsa yang berdaya saing⁷ dengan sasaran pokok di bidang ekonomi adalah: (i) pendapatan per kapita setara dengan negara berpendapatan menengah pada tahun 2025; (ii) tingkat pengangguran di bawah 5 persen; (iii) jumlah rakyat miskin di bawah 5 persen penduduk; (iv) kualitas SDM meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan; (v) struktur ekonomi kokoh; dan (vi) tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain.⁸ Adapun arah pembangunan yang ditempuh adalah terwujudnya SDM berkualitas, perekonomian berdaya saing global, penguasaan dan pengembangan Iptek, sarana dan prasarana yang memadai dan maju, serta reformasi hukum dan birokrasi.⁹

¹ Joseph Stiglitz, 1998. "Towards A New Paradigm for Development", 9th Raúl Prebisch Lecture, United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD), hal.5

² *Ibid*, hal.17

³ World Bank, 1998. "Assessing Aid: What Works, What Doesn't, And Why", hal.87.

⁴ Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang "Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional", bagian penjelasan umum angka 3 (tentang proses perencanaan) dan pasal 2 (4), pasal 5 (3), pasal 6 (2), dan pasal 7 (2).

⁵ Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dukuh Jeruk 2024 – Kec. Karangampel <https://karangampel.indramayukab.go.id/musyawarah-perencanaan-pembangunan-desa-musrenbangdes-dukuh-jeruk-tahun-2024/>

⁶ UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Penjelasan, hal.4

⁷ *Ibid*, hal.39

⁸ *Ibid*, hal.41

⁹ *Ibid*, hal.46



Gambar 1. Lanskap Daya Saing (*Competitiveness Landscape*)

Sumber: IMD, *World Competitiveness Booklet 2023*, hal.81

Daya saing dibangun oleh empat faktor (Gambar 1) atau pilar, yaitu kinerja ekonomi (*economic performance*), efisiensi pemerintah (*government efficiency*), efisiensi usaha (*business efficiency*), dan sarana-prasarana (*infrastructure*).¹⁰ Setiap faktor tersebut mempunyai lima komponen atau sub-faktor; faktor kinerja ekonomi terdiri atas sub-faktor kinerja ekonomi domestik, perdagangan internasional, investasi internasional, penyerapan tenaga kerja, dan tingkat inflasi. Sedangkan faktor efisiensi pemerintah meliputi sub-faktor keuangan publik, kebijakan pajak, kerangka kelembagaan, regulasi usaha, dan kerangka kerja masyarakat. Adapun faktor efisiensi usaha mencakup sub-faktor produktivitas dan efisiensi, pasar tenaga kerja, keuangan, praktik manajemen, serta sikap dan nilai. Kemudian faktor sarana-prasarana mempunyai sub-faktor infrastruktur dasar, infrastruktur teknologi, infrastruktur sains, kesehatan dan lingkungan, serta pendidikan.

II. Refleksi 2005-2025: Pertumbuhan Ekonomi Yang Berkualitas Dan Berkelanjutan

Refleksi di bidang ekonomi akan mengikuti alur penulisan sebagai berikut: pertama, refleksi mengenai pertumbuhan dan ketahanan ekonomi selama 18 tahun terakhir sebelum RPJPN berakhir pada tahun 2025, termasuk capaian dan pembelajaran yang dapat diambil. Kedua, refleksi tentang PDB per kapita dan kualitas pertumbuhan; sedangkan yang ketiga, stabilitas moneter dan keuangan. Keempat, mengungkapkan refleksi tentang ketahanan dan keberlanjutan fiskal serta rasio pajak; adapun yang kelima (terakhir) menjelaskan refleksi tentang daya saing, kontribusi industri manufaktur, dan produktivitas.

Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas mempunyai tiga dimensi, yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi serta lima faktor penentu kunci, yaitu: (i) inklusivitas manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi, (ii) menggunakan kapital alam, manusia, dan manufaktur secara efisien dan produktif, (iii) transformasi struktural yang meningkatkan nilai sosial dan ekonomi, (iv) investasi yang seimbang dari semua bentuk kapital, dan (v) batasan dalam bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan ditentukan oleh keterkaitan kebijakan ilmu pengetahuan yang kuat dan kredibel serta dialog dengan pemangku kepentingan.¹¹

Sementara dari hasil kesepakatan antara pemerintah dengan DPR, pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dimaknai sebagai pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan membuka kesempatan kerja yang luas serta menjadi sasaran

¹⁰ International Institute for Management Development (IMD), *World Competitiveness Booklet 2023*, hal.25

¹¹ UNESCAP: <https://sdghelpdesk.unescap.org/e-library/shifting-quantity-quality-growth-equality-efficiency-sustainability-and-dynamism>

pembangunan dalam dokumen pembangunan seperti RPJPN, RPJMN, dan RKP.¹² Adapun pertumbuhan ekonomi berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi dalam rangka mencapai pembangunan yang berkelanjutan; pertumbuhan harus inklusif dan ramah lingkungan untuk menurunkan kemiskinan dan membangun kemakmuran bersama bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang melalui pemanfaatan sumberdaya secara efisien, bijak, dan berkelanjutan.¹³

2.1. Pertumbuhan dan ketahanan ekonomi

Pada pembahasan ini ketahanan ekonomi dimaknai sebagai kemampuan suatu negara dalam membangun ekonominya agar tidak rapuh (*fragile*) dan punya daya tahan dalam menghadapi guncangan eksternal maupun internal. Beberapa faktor penentu (*determinants*) kerapuhan (*fragility*) dari suatu ekonomi/negara (suatu istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh salah seorang analis Morgan Stanley pada tahun 2013) antara lain adalah: pertumbuhan ekonomi, perubahan nilai tukar, defisit neraca transaksi berjalan (*current account deficit – CAD*), inflasi, rasio defisit APBN (*budget deficit*), cadangan defisa, kepemilikan asing terhadap surat utang pemerintah, utang pemerintah dalam dolar AS (USD), dan selisih suku bunga riil suatu negara terhadap suku bunga riil AS¹⁴–¹⁵. Dalam pembahasan ini dipilih 4 (empat) faktor saja, yaitu pertumbuhan ekonomi, defisit neraca transaksi berjalan atau CAD yang mewakili sektor eksternal, defisit APBN yang mewakili sektor fiskal, dan tingkat inflasi yang mewakili sektor moneter.

Selama 18 tahun perjalanan RPJPN 2005–2025, ekonomi Indonesia rata-rata tumbuh 4,98 persen per tahun (Grafik 1a) dengan rata-rata pertumbuhan lima tahunan antar RPJMN yang cenderung melambat, yaitu 5,60 persen (RPJMN 2005–2009), 5,93 persen (RPJMN 2010–2014), 5,02 persen (RPJMN 2015–2019), dan 2,31 persen (RPJMN 2020–2024). Angka terakhir merupakan rata-rata tiga tahun pertama RPJMN 2020–2024 (tahun 2020–2022) dimana terjadi resesi global 2020 akibat pandemi Covid-19 (ekonomi dunia berkontraksi -3,3 persen) sehingga ekonomi Indonesia juga mengalami resesi dan kontraksi/susut/tumbuh negatif 2,07 persen.¹⁶

Adapun salah satu penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi antar RPJMN adalah penurunan produktifitas sejak Krisis Moneter (Krismon) 1998.¹⁷ Sementara perbedaan pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang jika dibandingkan dengan negara-negara maju terletak pada perbedaan tingkat produktivitas sehingga agar konvergen diperlukan kebijakan yang mampu mendorong diversifikasi ekonomi dan perubahan struktural dari aktivitas berproduktivitas rendah kepada aktivitas berproduktivitas tinggi yang paling bisa diperdagangkan (*mostly tradable higher-productivity activities*).¹⁸

¹² DPR-RI, “Capaian Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Di Indonesia”, Laporan Kajian Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR-RI, 2014

¹³ World Bank. “Beyond Economic Growth 2nd ed”. 2004, hal.27

¹⁴ Morgan Stanley Research Report “FX Pulse”, 2013.

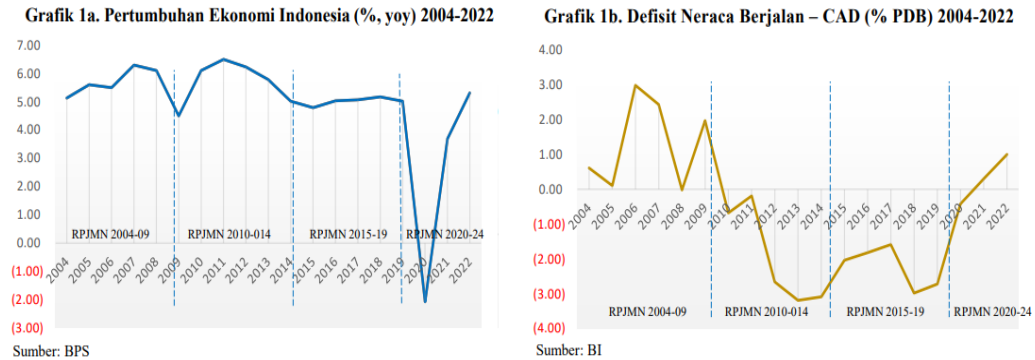
<http://www.morganstanleyfa.com/public/projectfiles/dce4d168-15f9-4245-9605-e37e2caf114c.pdf>

¹⁵ MORGAN STANLEY PRESENTS: “The Fragile Five’ — The Most Troubled Currencies In Emerging Markets”, <https://www.businessinsider.com/morgan-stanley-fragile-5-emerging-markets-2013-9> dan juga “Fragile five’ countries face taper crunch”, Financial Times (FT) reporters, December 18, 2013, <https://www.ft.com/content/407c42ac-6703-11e3-a5f9-00144feabdc0>

¹⁶ International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries, April 2021, hal.9

¹⁷ Bappenas, Diagnosis Pertumbuhan Indonesia: Prioritas Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, 2019, hal. 3 dan 21.

¹⁸ Dani Rodrik, The Future of Economic Convergence, NBER Working Paper No.17400, Sep-2011, hal. 2-4.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi dan Defisit Neraca Berjalan 2004–2022

Sumber: BPS, BI

Perlu dicatat bahwa dalam periode RPJPN tersebut terjadi empat guncangan global (*global shocks*) yang dapat dilalui Indonesia dengan relatif cukup baik, yaitu terjadinya Krisis Keuangan Global 2008-2009;¹⁹ Krisis Utang Pemerintah beberapa negara di wilayah Eropa tahun 2010-2013 (Portugal, Italia, Yunani, Spanyol, Irlandia, dan Cyprus)²⁰; serta Pandemi Covid-19 tahun 2020-2022²¹ yang diikuti oleh Perang Rusia-Ukraina 2022 yang masih berlangsung sampai sekarang.²²

Harus diakui bahwa hampir semua target pertumbuhan yang ditetapkan dalam RPJMN tidak tercapai (kecuali pada tahun 2005, 2010, dan 2011) karena berbagai tekanan baik dari luar maupun dalam negeri.^{[23][24]} Tekanan dari luar antara lain adalah ketidakpastian dunia yang tercermin dari WUI (*World Uncertainty Index*) yang semakin meningkat disertai dengan krisis global yang terjadi dalam interval yang semakin pendek/sering dengan skala yang semakin besar/tinggi,^{[25][26]} serta harga minyak dunia²⁷ dan komoditas lain²⁸ yang meningkat dan di sepanjang paruh pertama RPJMN relatif tinggi. Bencana kesehatan seperti pandemi Covid-19 juga memberikan tekanan global yang luar biasa sehingga pada April 2020 IMF terpaksa harus merevisi kebawah terhadap ramalan pertumbuhan ekonomi global dengan skala yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yaitu koreksi -6,3 persen.²⁹

Adapun tekanan dari dalam negeri antara lain adalah kenaikan harga BBM yang pernah

¹⁹ Knowledge@Wharton, "Victimizing the Borrowers: Predatory Lending's Role in the Subprime Mortgage Crisis", February 20, 2008, <https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/victimizing-the-borrowers-predatory-lendings-role-in-the-subprime-mortgage-crisis/>

²⁰ ECB, A tale of three crises: synergies between ECB tasks, ECB Occasional Paper Series No 305 / September 2022, hal.14.

²¹ WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19--11-march-2020>

²² Britannica, Russia-Ukraine War (2022–present), <https://www.britannica.com/event/2022-Russian-invasion-of-Ukraine>

²³ Bappenas, RPJMN 2005-2009, hal. V.34-12

²⁴ Bappenas, RPJMN 2010-2014, hal. I-81

²⁵ Ahir, Bloom & Furcerri, The World Uncertainty Index, NBER Working Paper 29763, February 2022, hal. 84.

²⁶ IMF Blog, April 15, 2022 (<https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/04/15/global-economic-uncertainty-surg-ing-amid-war-may-slow-growth>).

²⁷ U.S. Energy Information Administration (EIA), Crude Oil Prices: Brent - Europe [DCOILBRENTU], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; <https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRENTU>, August 7, 2023.

²⁸ IMF, Global Price Index of All Commodities [PALLFNINDEXQ], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; <https://fred.stlouisfed.org/series/PALLFNINDEXQ>, August 7, 2023.

²⁹ IMF, World Economic Outlook: The Great Lockdown, , Update April 2020, hl. 7.

sampai lebih dari 100 persen (Agustus 2005)³⁰ sebagai imbas kenaikan harga minyak dunia³¹ yang memicu membengkaknya subsidi BBM sehingga menekan ruang fiskal (*fiscal space*) menjadi semakin sempit dan meningkatkan risiko APBN. Sementara sejak Maret 2004 Indonesia telah mulai menjadi pengimpor minyak (*net oil importer*).³² Bencana alam seperti letusan gunung berapi serta banjir, rob air laut, tanah longsor, angin topan, dan kekeringan yang dipicu cuaca ekstrim akibat perubahan iklim juga dapat menjadi salah satu faktor dari dalam negeri yang berpotensi mengurangi pertumbuhan ekonomi. [33][34][35]

Selain karena masalah penurunan produktivitas, rata-rata pertumbuhan pada paruh pertama lebih tinggi antara lain juga karena karena berkah meningkatnya harga komoditas global (*global commodity boom*)³⁶ yang mendorong ekspor menjadi semakin baik dan kemudian merambat ke sektor lain seperti konsumsi rumah tangga dan investasi karena pendapatan juga naik. Selain itu pada periode tersebut meskipun Indonesia juga terimbas oleh krisis keuangan global 2008 namun bisa selamat antara lain karena minimalnya keterpaparan (*exposure*) perbankan dan lembaga keuangan kita terhadap krisis *subprime mortgages* AS dan cukup baiknya fundamental ekonomi, serta berkat kerjasama yang efektif antara Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam merespon krisis.³⁷

Dalam RPJMN 2005-2009, neraca transaksi berjalan rata-rata mengalami surplus 1,49 persen dari PDB (dengan kecenderungan menurun) terutama ditopang oleh harga komoditas dunia yang tinggi sehingga meningkatkan ekspor.³⁸ Defisit APBN terjaga pada tingkat yang aman (lebih kecil dari -3 persen PDB) atau rata-rata -0,95 persen PDB/tahun, meskipun terdapat peningkatan pada komponen belanja wajib (*mandatory spending*) seperti untuk pendidikan minimal harus 20 persen dari APBN³⁹ dan untuk kesehatan lima persen.⁴⁰ Di tengah resesi global pada tahun 2009 dimana ekonomi dunia berkontraksi -0,6 persen sebagai dampak dari krisis keuangan global 2008-2009,⁴¹ meskipun melambat Indonesia masih bisa tumbuh/ekspansi +4,5 persen (2009).⁴² Sedangkan inflasi pada periode tersebut rata-rata cukup tinggi (8,82 persen) terutama karena inflasi “dua digits” 17,1 persen tahun 2005 yang dipicu oleh dua kali kenaikan harga BBM domestik lebih dari 100 persen bersama tingginya harga komoditas dunia.[43][44] Dengan demikian selama periode tersebut perekonomian Indonesia bisa dikatakan tidaklah terlalu rapuh atau punya ketahanan, namun inflasi yang cukup tinggi harus ditangani lebih seksama dan diturunkan pada tahun-tahun berikutnya agar bisa di bawah 5 persen.

³⁰ Kompas, Sejarah Kenaikan BBM dari Era Soekarno hingga Jokowi, 7 September 2022,

<https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/07/140000479/sejarah-kenaikan-bbm-dari-era-soekarno-hingga-jokowi>

³¹ US-EIA, *bid*

³² WSJ, Net Imports Threaten Indonesia's OPEC Spot, <https://www.wsj.com/articles/SB108481829443413528>

³³ Weicheng Lian, Natural Disasters & Scarring Effects, IMF Working paper No. WP/22/253, Decemberr 2022.

³⁴ Bayoumi et.al., Growth at Risks from Natural Disasters, IMF Working Paper, WP/21/234, hal. 2 dan 4.

³⁵ Paul Cashin, et.al, Fair Weather or Foul? The Macroeconomic Effects of El Niño, IMF Working Paper, WP/15/89, hal. 1, 3, dan 6.

³⁶ IMF, Global price of Energy index [PNRGINDEXM], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; <https://fred.stlouisfed.org/series/PNRGINDEXM>, August 12, 2023.

³⁷ Boediono, Hidup di Tengah Krisis Ekonomi Dunia - FEB UGM, 30 Januari 2009. Dimuat pada majalah EBIZ Edisi 2 Tahun 2009, <https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/819-hidup-di-tengah-krisis-ekonomi-dunia>

³⁸ BI, Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan-IV tahun 2005 – 2009.

³⁹ UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1)

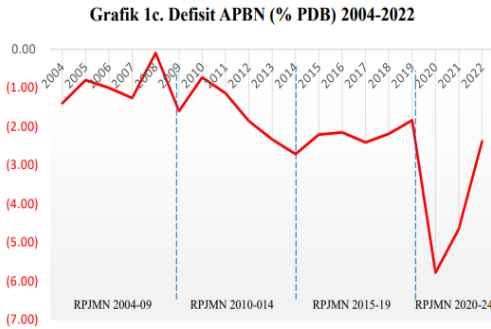
⁴⁰ UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), namun telah dianulir/dihapus oleh UU No. 17 Tahun 2023.

⁴¹ IMF, World Economic Outlook: Rebalancing Growth, April 2010, hal.2

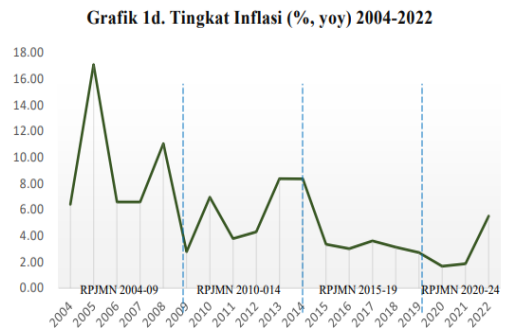
⁴² *Ibid*, hal.49

⁴³ Kompas, *Ibid*

⁴⁴ BPS, BRS No. 01 / IX / 2 Januari 200, hal. 1 dan No. 01/01/Th. XII, 5 Januari 2009, hal. 1.



Sumber: Kemenkeu



Sumber: BPS

Gambar 3. Grafik Desfisit APBN dan Tingkat Inflasi Indonesia 2004–2022

Sumber: Kemenkeu, BPS

Dalam periode RPJMN 2010–2014, pembangunan ekonomi Indonesia masih harus melalui berbagai tekanan, terutama ketidak-pastian dan memburuknya perekonomian global sebagai efek krisis utang pemerintah di kawasan Eropa 2010–2013, kembali meningkatnya harga komoditas dunia, isu pengurangan stimulus moneter (*tapering off*) oleh the Fed (bank sentral AS), inflasi yang tinggi pasca kenaikan harga BBM bersubsidi, serta menurunnya kredit perbankan akibat pengetatan kebijakan moneter.⁴⁵ Meskipun pertumbuhan ekonomi terjaga rata-rata di atas 5 persen/tahun, namun ketiga indikator kerapuhan lainnya perlu diwaspadai/ diperbaiki. Bahkan pada dua tahun terakhir (2013–2014) Indonesia sempat tercatat kedalam kategori lima negara yang ekonominya rapuh (*Fragile Five economies*) bersama India, Rusia, Afrika Selatan, dan Turki⁴⁶. Dalam dua tahun tersebut pertumbuhan ekonomi melambat (namun masih lebih tinggi dari 5 persen), defisit neraca transaksi berjalan (CAD) meningkat sehingga melampaui batas kritis -3 persen PDB, defisit APBN kian mendekati batas kritis -3 persen PDB, serta inflasi melonjak di atas 8 persen (Grafik 1a–1d).

Meningkatnya defisit neraca transaksi berjalan dalam periode 2010–2014 terutama terjadi pada komponen pembayaran dividen dan bunga atas kepemilikan surat-surat berharga domestik oleh nonresiden.⁴⁷ Sedangkan meningkatnya defisit APBN terutama karena membengkaknya subsidi energi lebih dua kali lipat dari Rp 637,2 triliun (2005–2009) menjadi Rp 1.353,9 triliun (2010–2014)⁴⁸. Adapun tingginya inflasi pada tahun 2013 terutama disebabkan oleh lonjakan komponen harga yang diatur oleh pemerintah (*administerred prices*), yaitu harga BBM dan tarif tenaga listrik (TTL) serta harga pangan yang mudah bergejolak (*volatile food prices*) akibat gangguan iklim; sedangkan inflasi 2014 utamanya disebabkan oleh komponen harga yang diatur oleh pemerintah (BBM, LPG dan TTL).⁴⁹

Dalam periode RPJMN 2015–2019 perekonomian Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen/tahun di tengah tekanan besar ketidakpastian kondisi ekonomi global, utamanya oleh perang dagang antara Amerika dan Tiongkok, meningkatnya proteksionisme, volatilitas harga komoditas, serta potensi penurunan pertumbuhan ekonomi dunia.⁵⁰ Memasuki tahun 2015, Indonesia bersama India dapat keluar dari status “*fragile five economies*” sehingga tersisa 3

⁴⁵ Bappenas, Evaluasi RPJMN 2010–2014, Maret 2015 hal V-1⁴⁶ *Ibid*⁴⁷ BI, Neraca Pembayaran Triwulan-IV 2014, hal.15.⁴⁸ Kemen ESDM, Reformasi Subsidi Energi: Belanja Jadi Lebih Produktif, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/reformasi-subsidi-energi-belanja-jadi-lebih-produktif>⁴⁹ BI, Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2014, hal. xxxvii⁵⁰ Bappenas, Evaluasi Akhir RPJMN 2015–2019, Oktober 2019, hal.25

negara yang ekonominya masih bermasalah (*troubled trio economies*), yaitu Afrika Selatan, Rusia, dan Turki.⁵¹ Dalam periode ini defisit transaksi berjalan (CAD) pada tiga tahun pertama (2015–2017) dapat ditekan sehingga rata-rata di bawah -2,0 persen PDB, namun kemudian pada dua tahun terakhir (2018–2019) melonjak mendekati batas kritis -3,0 persen PDB. Defisit APBN dapat terjaga dan cenderung menurun terutama berkat kebijakan pemangkasan subsidi energi yang dialihkan kepada belanja yang produktif.⁵² Inflasi juga dapat ditekan sehingga turun drastis dari rata-rata 6,36 persen/tahun (2010–2014) menjadi 3,17 persen/tahun (2015–2019); bahkan inflasi 2019 terendah dalam 20 tahun yang salah satunya berkat kolaborasi dan sinergi kebijakan yang efektif antara Pemerintah (Pusat dan Daerah) dengan BI dalam mengendalikan inflasi sehingga harga-harga tetap terjaga. ^{[53][54]}

Tampaknya BI telah melakukan kebijakan moneter yang tidak kolot atau tidak biasa (*unorthodox or unconventional monetary policies*), yaitu kebijakan moneter yang tidak semata-mata hanya menggunakan perubahan suku bunga sebagai alat pengendali, terutama ketika suku bunga acuan hampir mendekati nol seperti paska krisis keuangan global 2008/2009.⁵⁵ BI menggunakan bauran kebijakan (*policy mix*), yaitu integrasi antara kebijakan-kebijakan berikut: (i) kebijakan moneter yang diarahkan untuk mencapai stabilitas harga, (ii) kebijakan makroprudensial yang mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan dari perspektif makro, (iii) manajemen aliran modal asing, serta (iv) koordinasi dan komunikasi dengan otoritas terkait, terutama dengan pemerintah.⁵⁶ Terdapat beberapa koordinasi kebijakan antara Bank Sentral (BI) dengan Pemerintah, antara lain: koordinasi pengendalian inflasi, koordinasi pengembangan sektor riil, koordinasi stabilitas sektor keuangan, koordinasi mikro-makro prudensial, dan koordinasi pendorongan transformasi struktural.⁵⁷

Pada pihak pemerintah juga terdapat banyak koordinasi kebijakan lintas/multi sektor, misalnya dalam bidang perencanaan pembangunan yang melibatkan semua sektor pembangunan (termasuk pembangunan ekonomi) dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, antara lain: Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) dan Daerah (Musrenbangda) untuk membahas perencanaan pembangunan jangka panjang (RPJPN/D), menengah (RPJMN/D), dan tahunan (RKP/D) dari tingkat pusat/nasional hingga tingkat lokal/Desa (Musrenbangdes); demikian juga terdapat rapat-rapat koordinasi di tingkat Kementerian/Lembaga, Provinsi, Kabupaten/Kota, hingga Desa untuk pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan, termasuk pembangunan ekonomi.⁵⁸

Pada saat pandemi 2020–2022 (tiga tahun pertama RPJMN 2020–2024), perekonomian Indonesia juga terkena dampaknya sehingga sempat terperosok kedalam jurang resesi 2020, namun ketahanan (dari kerapuhan) ekonomi masih bisa dijaga. Perekonomian cepat pulih dari kontraksi (2020) dan berbalik tumbuh positif/ekspansif (2021) serta tumbuh makin cepat/kuat pada 2022, yaitu 5,31 persen. Transaksi berjalan (*current account*) justru semakin membaik, dari

⁵¹ Reuters, From fragile five to troubled trio, March 11, 2015, <https://www.reuters.com/article/emerging-fragile-idINKBN0M71BC20150311>

⁵² BI, *Ibid*, hal.112

⁵³ Kemenko Perekonomian RI, Sukses Tekan Inflasi 2019, Pemerintah dan BI Lanjutkan Sinergi Melalui TPIP, Siaran Pers No. HM.4.6/21/SET.M.EKON.2.3/02/2020, 13 Februari 2020,

<https://ekon.go.id/publikasi/detail/122/sukses-tekan-inflasi-2019-pemerintah-dan-bi-lanjutkan-sinergi-melalui-tpip>
⁵⁴ Sekretariat Kabinet RI, Sambutan Presiden RI Pada Rakornas VI Tim Pengendalian Inflasi Derah 2015, <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-ri-pada-rakornas-vi-tim-pengendalian-inflasi-derah-2015-di-hotel-grand-sahid-jaya-jakarta-27-mei-2015/>

⁵⁵ IMF, Unconventional Monetary Policies—Recent Experience And Prospects, April 18, 2013, hal. 5.

⁵⁶ Perry Warjiyo dan Solikin Juhro, Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses, Handbook of Central Banking Studies, BI Institute 2022, hal. 3–9.

⁵⁷ Solikin M. Juhro, Central Bank Policy Mix @Next Level: Memperkuat Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi, Mengawal Era Kenormalan Baru, BI Institute Open Lecture Series 29, September 2020, hal. 24.

⁵⁸ UU No.25 tentang SPPN serta berbagai sumber/dokumen RPJPN/D, RPJMN/D, RKP/D, dan sebagainya.

defisit (2019 dan 2020) kemudian berbalik menjadi surplus pada tahun 2021 dan 2022 ditopang oleh surplus perdagangan selama 32 bulan berturut-turut (per Desember 2022)⁵⁹ terutama berkat kenaikan harga-harga komoditas di pasar dunia.⁶⁰ Namun perlu diwaspadai adanya potensi penurunan harga seiring dengan pemulihan rantai pasok dan ekonomi dunia paska pandemi yang tentu akan berpotensi menurunkan atau bahkan membalik surplus neraca perdagangan dan juga transaksi berjalan.

Defisit APBN yang sempat melebihi batas kritis -3 persen, yaitu -6,14 persen (2020) dan -4,37 persen (2021) kemudian dapat diturunkan menjadi 2,38 persen pada 2022 terutama didukung oleh kenaikan penerimaan pajak seiring pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang semakin kuat.⁶¹ Perlu dicatat bahwa defisit APBN melebihi -3 persen dimungkinkan/dijamin oleh Undang-undang No.2 Tahun 2020 pasal 2 ayat (1) huruf a yang mengatur bahwa defisit anggaran diperbolehkan melampaui -3 persen PDB paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022; dan mulai tahun 2023 besaran defisit akan kembali menjadi paling tinggi sebesar -3 persen PDB.⁶² Sebenarnya jika tidak ada pandemi sebenarnya defisit APBN selama tiga tahun tersebut cukup kecil dan masih dalam batas aman mengingat realisasi anggaran Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PK-PEN) selama pandemi adalah Rp 575,8 triliun, Rp 695,2 triliun, dan Rp 414,5 triliun;⁶³ atau masing-masing sekitar 3,7 persen (2020), 4,0 persen (2021), dan 2,0 persen PDB (2022).

Inflasi bisa dikendalikan pada level yang rendah pada tahun 2020 dan 2021 (Grafik 1d), bahkan pada tahun 2020 mencetak rekor inflasi terendah sejak 1960⁶⁴ terutama didorong oleh penurunan permintaan masyarakat karena resesi. Namun perlu diwaspadai jika dibiarkan hingga menjadi deflasi secara persisten (berlangsung relatif cukup lama) bisa menjadi pertanda buruk karena penurunan daya beli masyarakat yang berpotensi menurunkan konsumsi dan PDB. Pada tahun 2022 inflasi sempat meningkat pesat dan mencapai 5,51 persen atau tertinggi selama 8 tahun terakhir didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat seiring pemulihan ekonomi paska pandemi serta meningkatnya harga komoditas global, utamanya harga pangan dan energi yang dipicu oleh gangguan rantai pasok global paska pandemi yang diperparah oleh perang Rusia-Ukraina. ^{[65][66]}

Sekarang kita bandingkan tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan negara-negara yang masuk kedalam kelompok BRICS dan ASEAN6 (Grafik 2a dan 2b). BRICS merupakan sekelompok negara yang beranggotakan Brazil, Rusia, India, China (Tiongkok) dan *South Africa* (Afrika Selatan) dan dianggap sebagai 5 negara berkembang terdepan di dunia. Akronim ini semula hanya BRIC dan pertama kali dicetuskan pada tahun 2001 oleh Jim O'Neill, yang memperkirakan bahwa pada tahun 2050 gabungan ekonomi kelompok negara tersebut akan

⁵⁹ Kementerian Perdagangan RI, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mantul-neraca-perdagangan-surplus-32-bulan-berturut>

⁶⁰ IMF, Global Price Index of All Commodities, *Ibid*

⁶¹ Sekretariat Kabinet RI, 16 Januari 2023, <https://setkab.go.id/konsolidasi-fiskal-cepat-airlangga-defisit-apbn-lebih-rendah-dari-target/>

⁶² Undang-undang No.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

⁶³ Kemenko Perekonomian, Realisasi Anggaran PC-PEN 2020-2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230126/9/1621743/airlangga-realisis-anggaran-pc-pen-2022-rp4145-triliun>

⁶⁴ World Bank, Inflation, consumer prices for Indonesia [FPCPITOTLZGIDN], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; <https://fred.stlouisfed.org/series/FPCPITOTLZGIDN>, August 18, 2023.

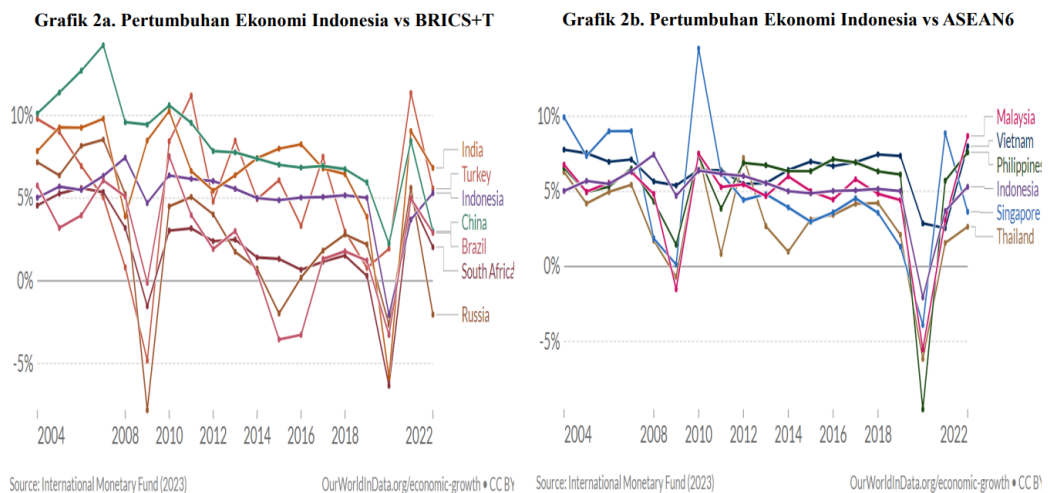
⁶⁵ Bappenas, RKP 2023, hal. I.10

⁶⁶ BPS, Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022, BRS No. 01/01/Th. XXVI, Jan-2023, hal.1-2.

menjadi kekuatan ekonomi dunia yang baru.⁶⁷ Nama kelompok BRIC tersebut kemudian bertambah huruf kapital “S” menjadi BRICS ketika Afrika Selatan bergabung pada tahun 2010.⁶⁸ Adapun ASEAN6 adalah 6 negara anggota ASEAN yang mempunyai PDB terbesar di kawasan tersebut dan prospek perekonomiannya paling potensial untuk cepat berkembang, yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam.⁶⁹

Sepanjang periode 18 tahun (2004–2022) pertumbuhan ekonomi Tiongkok hampir selalu di “peringkat” pertama di antara negara-negara BRICS dan ASEAN6, sedangkan negara-negara yang lain (termasuk Indonesia) saling berganti posisi di “peringkat” kedua ke bawah. Empat guncangan global yang terjadi pada periode tersebut, tercermin dari adanya palung-palung kontraksi ekonomi pada Grafik 2a dan 2b.

Pada tahun 2008 saat ekonomi dunia berkontraksi -1,3 persen, ekonomi Indonesia bersama Tiongkok justru tumbuh/ekspansi di atas 6 persen dan pada tahun 2009 bersama Tiongkok, India, dan Vietnam mampu tumbuh di atas 4 persen. Sementara pada tahun yang sama banyak negara lain justru mengalami kontraksi dan yang terparah adalah Rusia dan Turki (di bawah -4 persen). Pada saat krisis utang negara zona Eropa, Indonesia sempat tergolong kedalam *Fragile Five Economies* namun tetap bisa tumbuh di atas 5 persen pada 2013–2014 bersama lima negara lainnya (Turki, Tiongkok, India, Filipina, dan Vietnam) namun pada 2015 bersama India bisa lepas dari status tersebut.



Gambar 4. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia vs BRICS+T dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia vs ASEAN6

Sumber: IMF(2023)

Selama pandemi Covid-19, kinerja ekonomi Indonesia bukanlah yang terburuk meskipun pada 2020 ekonomi Indonesia berkontraksi seiring dengan resesi ekonomi di dalam negeri dan di bawah tekanan resesi dunia, namun pertumbuhannya bisa di posisi keempat setelah Vietnam, Tiongkok, dan India. Tahun berikutnya (2021, Indonesia bersama semua negara dalam

⁶⁷ Jim O'Neill, Building Better Global Economic BRICS, Goldman Sachs Global Economics Paper No: 66, 30th November 2001, hal.S.03.

⁶⁸ Bloomberg, South Africa to Join BRIC to Boost Emerging Markets, 24 December 2010, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-12-24/south-africa-asked-to-join-bric-to-boost-cooperation-with-emerging-markets>

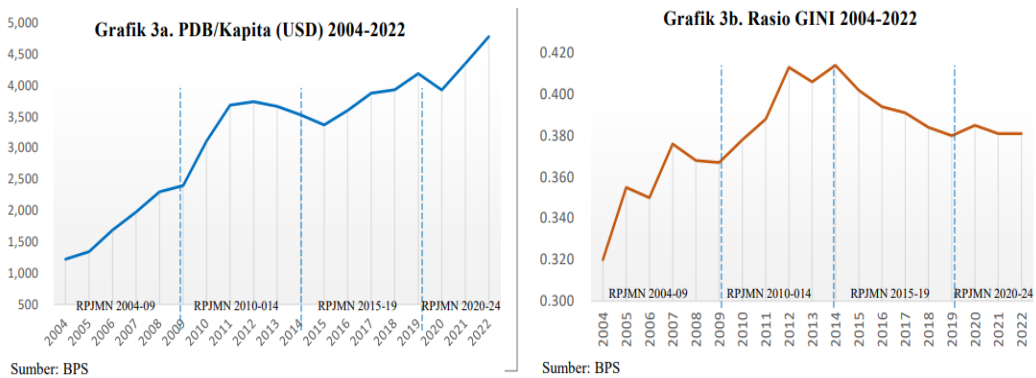
⁶⁹ The ASEAN Secretariat, ASEAN Statistical Yearbook 2022, hal. 41.

kedua kelompok tersebut mampu keluar dari resesi dan pada tahun 2022 tumbuh semakin kuat, yaitu 5,3 persen.

Indonesia cukup baik dalam menangani pandemi yang dilakukan melalui integrasi kebijakan ekonomi (ditangani oleh Satuan Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional) dan kesehatan (dilaksanakan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19) di bawah kendali Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).⁷⁰ Ketika terjadi lonjakan kasus baru pandemi, dilakukan rapat koordinasi untuk membahas kemungkinan diberlakukannya pembatasan mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat – PPKM); namun ketika kasus mereda/aman maka mobilitas dilonggarkan dan kegiatan ekonomi didorong kembali (level PPKM diturunkan atau bahkan dicabut).⁷¹ Dalam operasionalnya, KPCPEN mempunyai lima klaster program, yaitu: (i) kesehatan, antara lain untuk bantuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), insentif tenaga medis, dan vaksin; (ii) perlindungan sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako; (iii) dukungan UMKM dan koperasi misalnya imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga KUR; (iv) program prioritas, antara lain program padat karya dan ketahanan pangan; serta (v) insentif usaha, seperti pengurangan pajak penghasilan kendaraan bermotor dan properti.⁷²

2.2. PDB per kapita dan kualitas pertumbuhan ekonomi

Dalam kurun waktu 18 tahun RPJPN 2005-2024, PDB per kapita terus meningkat (kecuali pada 2020 saat pandemi Covid-2019) dan rata-rata tumbuh 8,31 persen/tahun dengan kecenderungan melambat pada tiga RPJMN pertama. Pada RPJMN 2005-2009 PDB/kapita rata-rata tumbuh 14,75 persen/tahun dan pada 2009 mencapai USD 2.400/kapita; pada RPJMN 2010-2014 rata-rata tumbuh 10,24 persen/tahun dan pada 2019 menjadi USD 3.532/kapita, serta dalam RPJMN 2015-2019 rata-rata hanya tumbuh 3,60 persen namun pada 2019 mampu mencatatkan rekor bersejarah dengan naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah-atas (*upper-middle income country*) dengan pendapatan USD 4.070/kapita (Pendapatan Nasional Bruto – PNB atau *Gross National Income – GNI* per kapita).^{[73][74]}



Gambar 5. Grafik PDB/Kapita (USD) 2004-2022 dan Rasio GINI 2004-2022

Sumber: BPS

⁷⁰ Peraturan Presiden No.82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

⁷¹ Kemenko Perekonomian, Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, 2022, hal. 24.

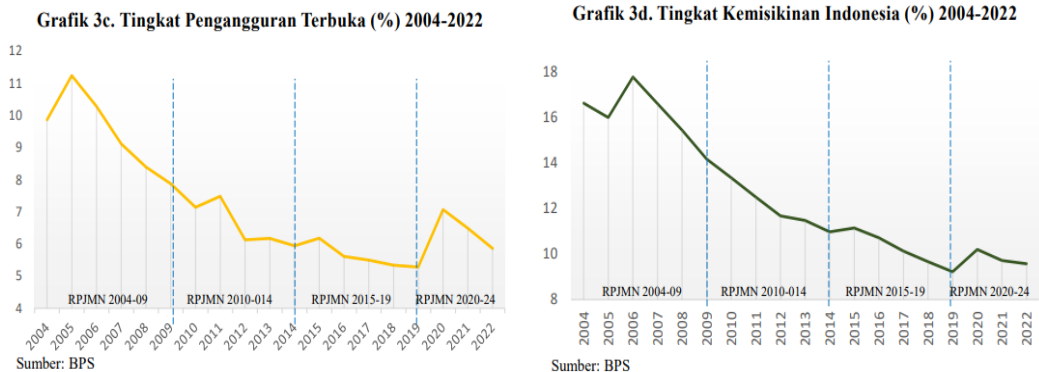
⁷² *Ibid*, hal. 25.

⁷³ World Bank, New country classifications by income level: 2019-2020, <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2019-2020>

⁷⁴ Indonesia now upper middle-income country, World Bank says - Business - The Jakarta Post, July 2, 2020, <https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/02/indonesia-now-upper-middle-income-country-world-bank-says.html>

Status negara berpenghasilan menengah-atas tersebut juga merupakan pencapaian terhadap sasaran yang ditetapkan oleh RPJPN 2005-2025.⁷⁵ Namun pada tahun 2020 Indonesia terhempas jatuh kembali ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah akibat resesi karena pandemi Covid-19. Pada 2022 Indonesia mampu segera bangkit dari resesi dan kembali masuk ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-atas dengan pendapatan USD 4.580/kapita.⁷⁶

Meskipun rata-rata pertumbuhan ekonomi (Grafik 1a) dan PDB per kapita (Grafik 3a) dalam dua RPJMN pertama (paruh pertama RPJPN) lebih tinggi dari dua RPJMN terakhir (paruh kedua RPJPN), namun kesenjangan pendapatan justru meningkat (Grafik 3b) Sebaliknya kecuali di saat pandemi Covid-19, kualitas pertumbuhan pada paruh kedua terjaga dengan baik terutama kesenjangan pendapatan (rasio GINI) yang cenderung menurun.



Gambar 5. Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka 2004–2022 dan Tingkat Kemiskinan Indonesia 2004–2022

Sumber: BPS

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga dapat diturunkan, dari 11,24 persen (2005) menjadi 7,87 persen (2009), turun lagi menjadi 5,94 persen (2014), dan 5,28 persen (2019) atau hampir mendekati target RPJPN bahwa tingkat pengangguran di bawah 5 persen.⁷⁷ Dibayangi oleh tekanan resesi ekonomi akibat pandemi Covid-19, tingkat pengangguran kembali meningkat menjadi 7,07 persen (2020), namun kemudian dapat segera diturunkan lagi menjadi 6,49 persen (2021) dan 5,86 persen (2022) seiring pemulihan ekonomi.

Salah satu tantangan terbesar bagi ahli ekonomi adalah masalah kemiskinan⁷⁸ dan pada saat RPJPN 2005–2025 disusun tingkat kemiskinan Indonesia masih di angka dua digits, yaitu 16,6 persen pada tahun 2004 (lihat Grafik. 3c) dengan jumlah 35,1 juta orang.⁷⁹ Kemudian tingkat kemiskinan dapat diturunkan menjadi 10,96 persen (2014) hingga mencetak sejarah menjadi “satu digit” (di bawah 10 persen) ke angka 9,66 persen (2018). Tingkat kemiskinan meningkat lagi menjadi 10,19 persen (2020) akibat resesi di saat pandemi, namun segera turun lagi menjadi 9,71 persen (2021) dan 9,57 persen (2022) seiring dengan proses pemulihan ekonomi yang

⁷⁵ Undang-undang No. 17 tahun 2007, hal. 41

⁷⁶ Indonesia Regains Upper-Middle Income Rank on Growth Rebound – Bloomberg, July 3, 2023

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-03/indonesia-reclaims-upper-middle-income-rank-on-post-covid-growth#xj4y7vzkg>

⁷⁷ UU No. 17/2007, *Ibid*

⁷⁸ Joseph E. Stiglitz (2002). *Globalisation and Its Discontents*, hal.25

⁷⁹ BPS, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970–2017

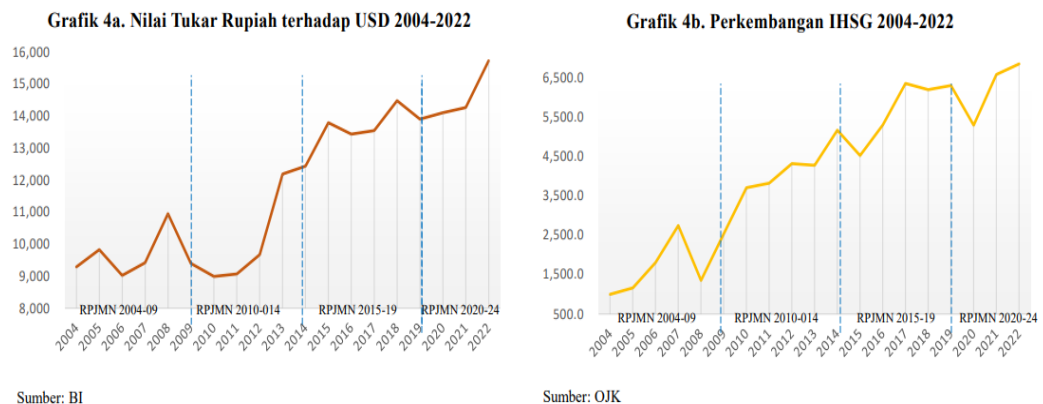
<https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html>

berlangsung cepat.

Meskipun target tingkat kemiskinan di bawah 5 persen tampaknya sulit dicapai dalam sisa 2 tahun RPJPN, namun pada bulan Mei 2023 Bank Dunia memberikan kabar gembira bahwa Indonesia telah membuat kemajuan yang luar biasa dalam pengurangan kemiskinan sehingga kemiskinan ekstrim pada dasarnya telah dapat dihapuskan berkat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dibarengi dengan program perlindungan sosial yang baik.⁸⁰ Kemiskinan ekstrim yang didefinisikan sebagai hidup dengan kurang dari US\$ 1,90 (2011 PPP atau paritas daya beli) per hari, turun dari 19 persen pada tahun 2002 menjadi 1,5 persen pada tahun 2022 dan secara praktis telah memenuhi tujuan Pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrim lebih cepat dari jadwal yang diharapkan pada tahun 2024, namun Bank Dunia menyarankan agar batas kemiskinan ekstrim tersebut disesuaikan lagi seiring dengan peningkatan Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah-atas.⁸¹

2.3. Stabilitas moneter dan keuangan

Dalam bagian ini akan dibahas dua indikator saja, yaitu nilai tukar rupiah (Grafik 4a) dan perkembangan IHSG (Grafik 4b) karena inflasi sudah dibahas di bagian sebelumnya (Grafik 1d). Sepanjang 18 tahun RPJPN 2005-2025, rata-rata nilai tukar rupiah terdepresiasi 3,35 persen setiap tahunnya dan terjadi pelemahan/depresiasi nilai tukar rupiah yang cukup tajam pada tahun 2008 (-16,25 persen), 2013 (-26,05 persen), 2015 (-10,89 persen), dan 2022 (-10,25 persen). Penyebab utama pelemahan rupiah tersebut selain karena faktor eksternal seperti indeks dolar AS⁸² dan guncangan global, juga disebabkan oleh memburuknya salah satu atau lebih dari indikator kerapuhan ekonomi (inflasi, defisit transaksi berjalan, dan/atau defisit APBN).



Gambar 5. Grafik Nilai Tukar Ruoiah Terhadap USD 2004-2022 dan Perkembangan IHSG 2004-2022

Sumber: BI, OJK

Kejatuhan nilai Rupiah tahun 2008 dipengaruhi oleh perkembangan krisis keuangan global yang semakin parah, gejala harga komoditas, perlambatan ekonomi dunia yang memicu memburuknya persepsi investor (khususnya terhadap *emerging market*, termasuk Indonesia), dan ekspektasi pelaku pasar yang memicu sentimen negatif di pasar keuangan sehingga

⁸⁰ World Bank, Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security, May 9 2023, hal. xix.

⁸¹ *Ibid*, hal. xx.

⁸² Data 25 tahun indeks dolar di Trading Economics (DXY Dollar Index <https://tradingeconomics.com/dxy:cur>)

menyebabkan terjadinya pelepasan aset rupiah.⁸³ Adapun pelemahan Rupiah pada 2013 antara lain dipicu oleh melebarnya defisit transaksi berjalan – CAD (Grafik 1b) dan meningkatnya aliran keluar modal asing di pasar keuangan akibat rencana pengurangan stimulus moneter di AS yang memperburuk neraca pembayaran Indonesia (NPI) serta inflasi domestik yang tinggi dan persepsi negatif investor terhadap prospek melebarnya defisit transaksi berjalan.⁸⁴

Sedangkan terdepresiasinya Rupiah dengan cukup tajam pada 2015 terutama dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu ketidakpastian kenaikan suku bunga *The Fed (Fed Fund Rate – FFR)*, kekhawatiran gagalannya negosiasi fiskal Yunani, dan devaluasi yuan; kemudian diperberat oleh kondisi domestik yang diwarnai oleh melemahnya prospek pertumbuhan ekonomi, belum dalamnya pasar keuangan domestik, dan tingginya ketergantungan korporasi terhadap pembiayaan eksternal.⁸⁵ Sementara melemahnya Rupiah pada 2022 terutama karena tajamnya peningkatan suku bunga acuan kebijakan moneter global (seperti FFR di AS) dan diperkirakan terjadi dalam periode yang lama sebagai respons atas kenaikan tajam inflasi di negara-negara maju, penguatan tajam mata uang dolar AS atau “*strong dollar*” seiring dengan kenaikan FFR, dan ketidakpastian pasar keuangan global sehingga memberikan tekanan pada banyak mata uang dunia, termasuk Rupiah; serta terjadinya fenomena “*cash is the king*” sejalan dengan persepsi investor global terhadap risiko yang tinggi dalam berinvestasi di Indonesia dan negara berkembang lain sehingga membuat mereka menarik dananya untuk dialihkan ke instrumen investasi yang dipandang likuid dan mendekati cash.⁸⁶

Pada rentang waktu yang sama perkembangan bursa saham Indonesia cukup baik, tercermin dari indeks harga saham gabungan (IHSG) yang rata-rata tumbuh 15,46 persen per tahun dengan dua kali koreksi yang sangat tajam. Pertama, pada tahun 2008, IHSG terhempas sebesar -50,64 persen yang disebabkan oleh aliran modal keluar oleh investor asing sebagai upaya *flight to quality* (kondisi ketika investor memilih untuk menginvestasikan uangnya pada instrumen investasi yang memiliki risiko lebih kecil agar berada dalam zona aman) dan diperparah oleh fenomena perbaikan struktur neraca (*deleveraging*) berbagai lembaga keuangan sejalan dengan meningkatnya intensitas krisis keuangan global.⁸⁷ Kedua, pada 2015 IHSG juga mengalami koreksi tajam -12,47 persen dipengaruhi oleh meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global akibat isu kenaikan FFR yang mendorong investor bukan penduduk (*non-residents*) untuk melakukan aksi jual saham.⁸⁸ Kunci BI bersama Pemerintah dalam menavigasi perekonomian Indonesia dan bisa selamat dari guncangan akibat kedua krisis di atas serta krisis-krisis lainnya adalah bauran kebijakan (termasuk penerapan kebijakan moneter yang tidak kolot atau tidak biasa) serta kerjasama/kolaborasi/sinergi/ gotong-royong antar pemegang otoritas dan pemangku kepentingan yang efektif.

2.4. Ketahanan dan keberlanjutan fiskal serta rasio pajak

Keberlanjutan fiskal adalah kemampuan pemerintah untuk mempertahankan kebijakan-kebijakan fiskalnya pada saat ini dan di masa yang akan datang dengan tetap menjaga posisi keuangannya dalam keadaan *solvent* (mampu memenuhi kewajiban keuangan jangka panjang).⁸⁹ Dalam bagian ini akan dibahas empat variable saja, yaitu défisit anggaran/APBN (telah dibahas pada bagian sebelumnya, Grafik 1c), rasio stok utang (Grafik 5a), keseimbangan primer (Grafik

⁸³ BI, LPI 2008, hal.23.

⁸⁴ BI, LPI 2013, hal. xxvii-xxxi dan hal.73-74.

⁸⁵ BI, LPI 2015, hal.37.

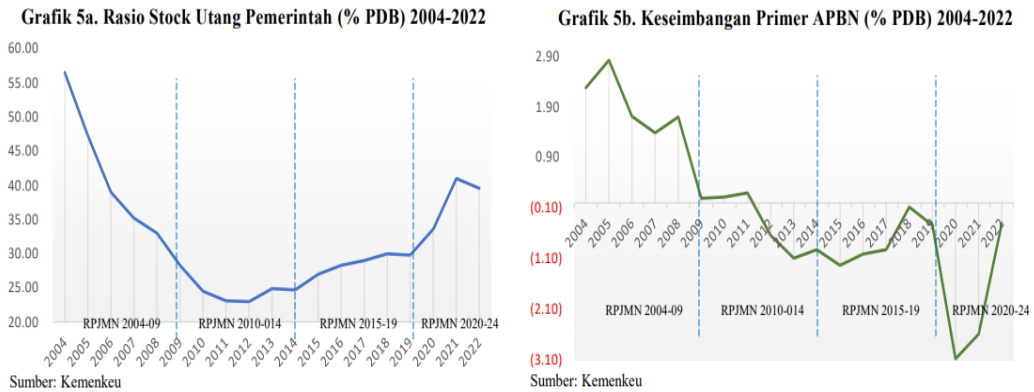
⁸⁶ BI, LPI 2022, hal. xxii.

⁸⁷ BI, LPI 2008, *Ibid*.

⁸⁸ BI, LPI 2015, hal.71.

⁸⁹ Craig Burnside, An Introduction to Fiscal Sustainability in Theory and Practice, di dalam “Fiscal Sustainability in Theory and Practice – A Handbook”, World Bank, 2005, hal. 2-3

5b), dan rasio pajak (Grafik 5c dan 5d) yang kesemuanya dalam rasio/persentase terhadap PDB.



Gambar 6. Grafik Rasio Stock Utang Pemerintah 2004–2022 dan Keseimbangan Primer APBN 2004–2022

Sumber: Kemenkeu

Rasio stok utang pemerintah sepanjang 18 tahun terjaga di bawah 60 persen dari PDB atau batas maksimal utang sesuai ketentuan undang-undang;⁹⁰ meskipun semula pada tahun 2004 cukup tinggi (56,5 persen PDB) namun dapat terus diturunkan dan dari tahun 2009 hingga 2019 dapat dijaga di bawah “batas konservatif” 30 persen PDB dan dalam periode pandemi Covid-19 meskipun naik namun terkendali di bawah 60 persen PDB (tepatnya di bawah 42 persen PDB). Dari posisi total utang pemerintah sebesar Rp 7.734 triliun pada 30 Desember 2022, sekitar 89 persen (Rp 6.847 triliun) merupakan surat berharga negara (SBN) dan mayoritas (80 persen) dalam Rupiah; sedangkan porsi pinjaman (11 persen) sebagian besar berupa pinjaman luar negeri bilateral dan multilateral.⁹¹ Jika dibandingkan dengan negara-negara BRICS dan ASEAN5 (data untuk Vietnam tidak tersedia), pada tahun 2022 rasio stok utang Indonesia terendah kedua setelah Rusia (19,6 persen PDB); sedangkan negara-negara yang lain hampir semuanya lebih tinggi dari 60 persen PDB, bahkan rasio stok utang Singapura mencapai 134,2 persen PDB.⁹²

Salah satu faktor yang perlu dicermati adalah kepemilikan asing dalam surat utang pemerintah karena diibaratkan sebagai pedang bermata dua; meskipun pada saat pasar kondisi stabil tingginya partisipasi kepemilikan asing dapat membantu mengurangi *yield spread* (perbedaan imbal-hasil di antara berbagai penerbitan efek), namun demikian pada saat terjadi guncangan ekonomi, kepemilikan asing akan memperburuk pelebaran *yield spread* sebagai dampak dari peningkatan risiko mata uang.^{[93][94]} Kepemilikan investor asing yang semula hanya 1,05 persen pada tahun 2003 dan sekitar 5 persen pada 2005 terus meningkat dan mencapai puncaknya pada tahun 2017 (39,8 persen).⁹⁵ Namun kemudian terus menurun hingga menjadi

⁹⁰ UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Penjelasan Pasal 12 ayat 3 menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

⁹¹ Kemenkeu, APBN Kita: Kaleidoskop 2022, hal. 144.

⁹² IMF, Fiscal Monitor April 2023 Update, hal 84

⁹³ Hong Kong Monetary Authority, The double-edged sword of foreign participation in local currency government bond markets, Research Memorandum 14/2019, 27 November 2019, hal. 27; dan Foreign participation in the local currency bond markets of emerging market economies: good or bad for market resilience and financial stability? BIS papers No.113, December 2020, hal. 136-137.

⁹⁴ Edmund Ho dan Cheung Ho, Foreign participation in local currency government bond markets in emerging Asia: Benefits and pitfalls to market stability, Journal of International Money and Finance, Volume 128, November 2022, 102699, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261560622001024>

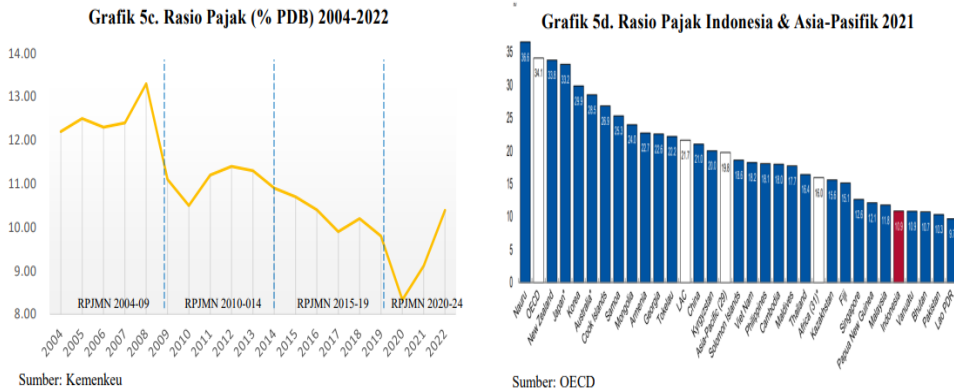
⁹⁵ BKF Kemenkeu, Kajian Singkat Perkembangan Pasar Surat Utang Indonesia dan Peran Asian Bond Market Initiative (ABMI), hal. 14.

14,36 persen pada akhir 2022 yang menunjukkan konsistensi upaya pemerintah untuk mencapai kemandirian pembiayaan yang didukung likuiditas domestik yang cukup.⁹⁶

Selama 18 tahun terakhir, keseimbangan primer cenderung menurun dari semula surplus/positif (+2,8 persen) pada tahun 2005 kemudian menjadi défisit/negatif -0,6 persen pada 2012 dan -0,4 persen pada 2022. Keseimbangan primer merupakan selisih dari total pendapatan negara dikurangi belanja negara di luar pembayaran bunga utang.⁹⁷ Jika surplus/positif, artinya keuangan negara cukup sehat karena tidak menggunakan skema penarikan utang baru untuk membayar kewajiban bunga utang alias gali lubang tutup lubang.

Kecuali Brazil dan Afrika Selatan, pada tahun 2022 hampir semua keseimbangan primer negara-negara BRICS dan ASEAN4 defisit/negatif (data Singapura dan Vietnam tidak tersedia), bahkan Tiongkok defisit -6,6 persen dari PDB.⁹⁸ Sementara menurut kajian Bank Dunia, surplus keseimbangan primer bersama ekspansi pertumbuhan ekonomi dan apresiasi nilai tukar riil Rupiah menjadi tiga faktor utama yang secara signifikan dapat menurunkan rasio utang terhadap PDB Indonesia.⁹⁹

Pada empat tahun pertama RPJPN 2005-2025, rasio pajak sempat meningkat dan mencapai angka tertinggi 13,3 persen PDB pada tahun 2008 (Grafik 5c) sebagai hasil dari reformasi perpajakan secara komprehensif sehingga telah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.¹⁰⁰ Namun sejak 2009 cenderung terus menurun menjadi 10,5 persen pada 2010 dan mencapai angka terendah 8,3 persen pada tahun 2020 (terendah selama 20 tahun) terutama akibat resesi ekonomi di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2022 rasio pajak naik menjadi 10,39 persen PDB (sekitar Rp 1.716 triliun) seiring dengan pemulihan ekonomi dan pendapatan masyarakat serta kenaikan harga komoditas ekspor Indonesia. Adapun faktor-faktor struktural yang secara signifikan menentukan penerimaan pajak adalah pendapatan/kapita dan keterbukaan perdagangan, sedangkan faktor-faktor kelembagaan yang berpengaruh signifikan adalah korupsi dan stabilitas politik-ekonomi.¹⁰¹



Gambar 7. Grafik Rasio Pajak 2004–2022 dan Rasio Pajak Indonesia & Asia-Pasific 2021
 Sumber: kemenkeu, OECD

⁹⁶ Kemenkeu, *Ibid*, hal. 145.

⁹⁷ IMF, *Fiscal Monitor*, October 2015, hal. 37.

⁹⁸ *Ibid*, hal. 79.

⁹⁹ Indermit Gill dan Brian Pinto, *Public Debt in Developing Countries: Has The Market-Based Model Worked?*, World Bank Policy Research Working Paper No.3674, August 2005, hal. 18-19.

¹⁰⁰ Bappenas, *RPJPMN 2010-2014*, hal. I-18.

¹⁰¹ Abhijit Sen Gupta, *Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries*, IMF Working Paper No. WP/07/184, July 2007, hal. 33-34.

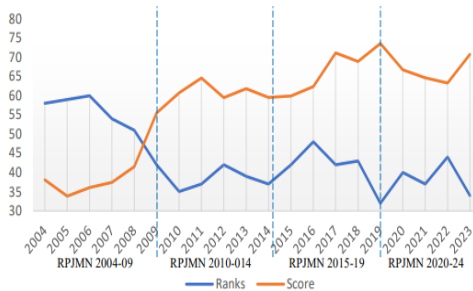
Jika dibandingkan dengan rata-rata rasio pajak 29 negara di kawasan Asia-Pasifik tahun 2021 (19,8 persen PDB), rasio pajak Indonesia termasuk sangat rendah (10,5 persen PDB), sama dengan Vanuatu dan hanya lebih tinggi dari Kamboja, Pakistan, dan Laos. Angka tersebut jauh di bawah rata-rata rasio pajak negara-negara di Afrika (16,0 persen PDB), Amerika Latin (21,7 persen PDB), dan apalagi OECD (34,1 persen PDB).¹⁰² Untuk itu Indonesia harus bekerja lebih keras agar mampu memacu kenaikan rasio pajaknya agar setara dengan negara-negara sekawasan dan sesama negara *emerging markets* melalui perbaikan faktor-faktor penentu di atas, terutama dalam hal pemberantasan korupsi.

Sebenarnya pemerintah bisa membuat target, misalnya dalam jangka pendek (kurang dari lima tahun) rasio pajak Indonesia bisa ditingkatkan setara dengan rata-rata Afrika (16 persen) atau pendapatan negara dari pajak bisa bertambah sekitar Rp 900 triliun dalam setahun dan akan terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi. Kemudian dalam jangka menengah (5-10 tahun) rasio pajak dapat ditargetkan sama dengan negara-negara Asia-Pasifik (20 persen), sedangkan dalam jangka panjang (10-20 tahun) setara negara-negara maju di Asia-Pasifik atau negara-negara anggota OECD (30-34 persen).

2.5. Daya saing, peran manufaktur, dan produktivitas

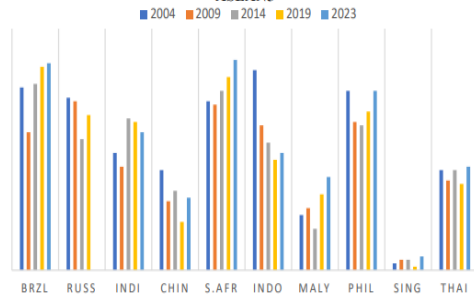
Sepanjang RPJPN 2005-2025 peringkat daya saing Indonesia cenderung meningkat yang didukung nilai daya saing yang meningkat pula, dari peringkat 59 (nilai 33,8) pada tahun 2005 menjadi peringkat tertinggi 32 (nilai 73,6) pada tahun 2019 dan sempat turun di masa pandemi, namun pada 2022 meningkat lagi ke peringkat 34 dengan nilai 70,2 (Grafik 6a). Jika dibandingkan dengan negara-negara BRICS dan ASEAN5 (data Vietnam tidak tersedia), dalam periode tersebut peringkat Indonesia cenderung meningkat bersama Tiongkok (Grafik 6b). Sementara India cenderung meningkat pada 8 tahun terakhir dan Rusia cenderung meningkat pada 15 tahun pertama, sedangkan peringkat negara-negara yang lain cenderung stagnan (Thailand) atau malah cenderung menurun (Brazil, Afrika Selatan, dan Malaysia).

Grafik 6a. Peringkat & Nilai Daya Saing Indonesia (IMD) 2004-2023



Sumber: IMD 2004-2022

Grafik 6b. Peringkat Daya Saing Global (IMD) Negara2 BRICS & ASEAN5



Sumber: IMD 2004, 2009, 2014, 2019, 2023

Gambar 8. Grafik Peringkat & Nilai Daya Saing Indonesia 2004-2022 dan Peringkat Daya Saing Global Negara-Negara BRICS & ASEAN5

Sumber: IMD,(2004-2023)

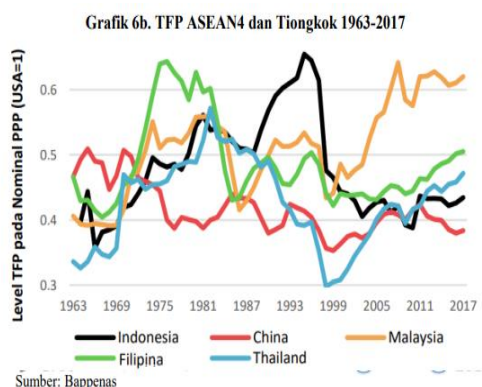
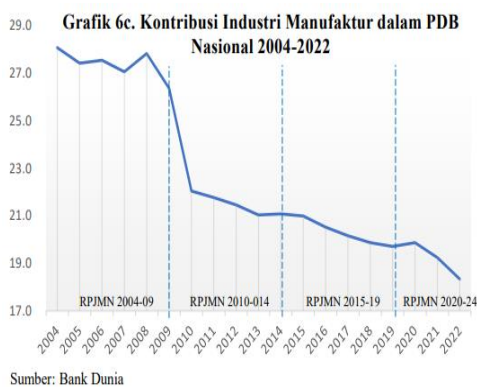
Pada tahun 2023 posisi daya saing Indonesia berada di peringkat 34 (dari 64 negara) atau di atas India (40), Filipina (52), Brazil (60), dan Afrika Selatan (61), bahkan Jepang (35); namun di bawah Singapura (4), Tiongkok (21), Malaysia (27), dan Thailand (30), sementara tidak tersedia data untuk Rusia dan Vietnam (Grafik 6b). Komponen (sub-faktor) daya saing Indonesia yang

¹⁰² OECD, Revenue Statistics in Asia & the Pacific 2023 — Indonesia, Key findings for Indonesia, <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>

terbaik/terkuat adalah pasar tenaga kerja (01), sedangkan yang cukup kuat/baik adalah kebijakan pajak (9), harga (12.), perilaku dan nilai (12), serta praktik manajemen (15).¹⁰³

Untuk sub-faktor kebijakan pajak yang lebih baik dari Indonesia hanya Thailand (8) dan sub-faktor harga hanya Malaysia (terbaik, 01).¹⁰⁴ Sementara untuk komponen perilaku dan nilai tidak ada yang lebih baik dari Indonesia (saingan terdekat Singapura, peringkat 13); demikian juga untuk sub-faktor praktik manajemen (saingan terdekat Thailand, peringkat 22).¹⁰⁵ Adapun sub-faktor yang cukup lemah/buruk adalah kesehatan dan lingkungan (58), pendidikan (57), perdagangan internasional (49), infrastruktur keilmuan (49), legislasi bisnis (46), kerangka kemasyarakatan (44), serta produktivitas dan efisiensi (42).¹⁰⁶

Pada 18 tahun pelaksanaan RPJPN 2005-2025, kontribusi industri pengolahan (manufaktur) selalu menurun, dari 28,1 persen terhadap PDB pada tahun 2005 menjadi 18,3 persen PDB pada tahun 2022 (Grafik 6c). Salah satu sebab utama penurunan kontribusi tersebut adalah rata-rata pertumbuhan sektor manufaktur dalam periode tersebut (4 persen/ tahun) lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Meskipun sektor manufaktur tetap dominan dalam menyerap tenaga kerja namun pertumbuhan penyerapan tenaga kerjanya lebih tinggi dari pertumbuhan penyerapan tenaga kerja total, artinya sektor manufaktur mengalami penurunan produktivitas.¹⁰⁷ Sektor manufaktur Indonesia juga didominasi oleh industri pengolahan ringan (seperti industri makanan dan minuman), industri padat karya (seperti industri tekstil dan pakaian jadi), dan industri berbasis SDA (seperti migas dan pertambangan lain serta kayu) atau masih didominasi industri padat karya berteknologi ringan tahap revolusi industri IR 2.0.¹⁰⁸



Gambar 9. Grafik Kontribusi Industri Manufaktur dalam PDB Nasional 2004-2022 dan TFP ASEAN4 dan Tiongkok 1963-2017

Sumber: Bank Dunia, Bappenas

Rendahnya pertumbuhan produktivitas menjadi salah satu sebab utama penurunan pertumbuhan PDB potensial, sementara satu dekade sebelum krisis Asia produktivitas Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan, lebih tinggi dari Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan Tiongkok (Grafik 6d); namun terjadi penurunan pertumbuhan total faktor

¹⁰³ IMD, World Competitiveness Booklet 2023, hal.81

¹⁰⁴ IMD, *Ibid*, hal. 52.

¹⁰⁵ IMD, *Ibid*, hal. 53.

¹⁰⁶ IMD, *Ibid*, hal. 81.

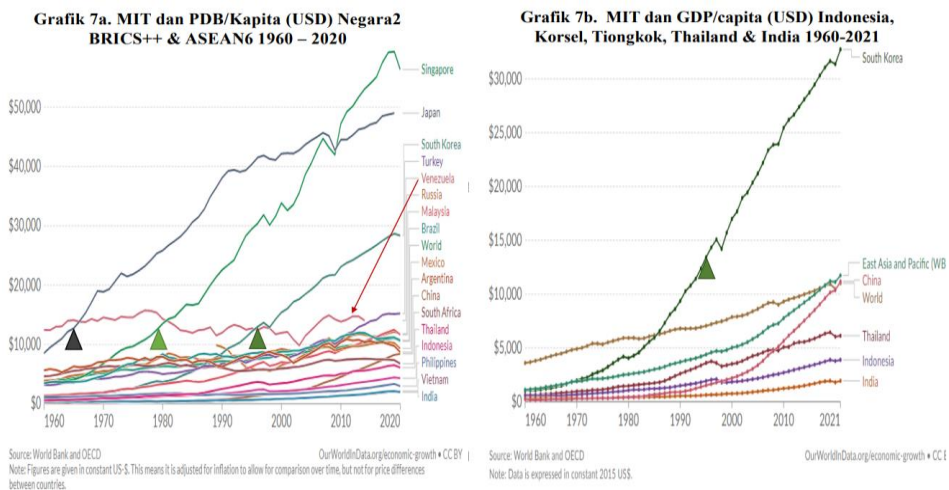
¹⁰⁷ Kiki Verico, What has been happening to Indonesia's Manufacturing Industry? LPEM-FEB UI Working Paper 058, March 2021, hal. 8.

¹⁰⁸ *Ibid*.

produktivitas Indonesia selama 15 tahun terakhir sehingga saat ini produktivitas Indonesia termasuk yang terendah di kawasan.¹⁰⁹ Adapun faktor-faktor yang menentukan (*determinants*) pertumbuhan TFP antara lain adalah modal manusia (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, import, kelembagaan, keterbukaan, kompetisi, perkembangan sektor keuangan, geografi, dan penguatan/pendalaman kapital (*capital intensity/ deepening*).¹¹⁰

III. Visi 2025-2045: Transformasi Ekonomi Untuk Keluar Dari Jebakan Negara Berpendapatan Menengah

Jebakan negara berpendapatan menengah atau *Middle-Income Trap (MIT)* merupakan istilah yang pertama kali diperkenalkan oleh Bank Dunia (tepatnya oleh Indermit Gill dan Homi Kharas) pada tahun 2007, dimana negara-negara berpendapatan menengah tumbuh kurang cepat karena terjepit di antara negara-negara berpendapatan rendah sebagai kompetitornya yang mendominasi industri-industri yang pasarnya sudah jenuh dan negara-negara inovator kaya yang mendominasi industri-industri yang teknologinya berubah cepat.¹¹¹ Suatu situasi dimana negara berpendapatan menengah tak bisa lagi berkompetisi di tingkat internasional di dalam produk-produk padat karya yang standar karena upah relatif terlalu tinggi, tapi mereka tidak juga dapat berkompetisi di dalam aktivitas-aktivitas bernilai tambah tinggi pada skala yang cukup karena produktivitasnya terlalu rendah; hasilnya adalah pertumbuhan yang lambat, upah yang stagnan atau jatuh, dan ekonomi informal yang semakin berkembang.¹¹²



Gambar 9. Grafik MIT dan PDB/Kapita (USD) Negara-Negara BRICS++ & ASEAN6 1960-2020 dan MIT & GDP/kapita (USD) Indonesia Korsel, Tiogkok, Thailand & India 1960-2021

Sumber: World Bank, OECD

Situasi “terjebak” ini terjadi karena negara berpendapatan menengah gagal dalam melakukan transisi menjadi negara berpendapatan tinggi akibat biaya yang meningkat dan daya

¹⁰⁹ Bappenas, *Diagnosis Pertumbuhan Indonesia: Prioritas Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi*, 2018, hal. 3.

¹¹⁰ Anders Isaksson, *Determinants of Total Factor Productivity: A Literature Review*, Research and Statistics Branch, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), hal. 77-78. July 2007

¹¹¹ Indermit Gill and Homi Kharas, *An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth*, The World Bank, 2007, hal. 5 dan 17-35.

¹¹² Eva Paus, *Escaping the Middle-Income Trap: Innovate or Perish*, ADB Institute, Working Paper 685, March 2017, hal. 1-4

saing yang menurun.¹¹³ Inti MIT adalah bahwa suatu sistem ekonomi walaupun secara mulus mampu mengadopsi teknologi asing yang memperkenalkan produktivitas tenaga kerja yang lebih baik dan gaji yang relatif lebih tinggi, namun tidak mampu menciptakan inovasi sendiri.¹¹⁴ Tidak memadainya pengembangan kemampuan inovasi domestik menjadi jantung dari MIT.¹¹⁵

Sangat sedikit negara berkembang yang berhasil melakukan transformasi dari negara yang berpendapatan rendah meningkat ke berpendapatan menengah dan kemudian menjadi negara berpendapatan tinggi (Grafik 7a). Misalnya Jepang, Singapura, dan Korea yang pada tahun 1960 mempunyai pendapatan per kapita USD 8.542, USD 3.501, dan USD 932, namun kemudian mereka berhasil mencapai pendapatan tinggi pada tahun 1965 (Jepang), 1980 (Singapura), dan 1995 (Korea). Pada tahun 2021 ketiga negara tersebut mempunyai pendapatan per kapita USD 35.291, USD 66.176, dan USD 32.731. Sampai saat ini Singapura menjadi satu-satunya negara ASEAN yang mampu meraih predikat negara berpendapatan tinggi.

Banyak negara berkembang lain masih tidak mampu beranjak dari kategori negara berpendapatan menengah. Contoh paling ekstrim adalah Venezuela (Grafik 7a) yang pada tahun 1962 sudah mencapai kategori negara berpendapatan tinggi (USD 12.992/kapita) namun pada tahun 1983 justru merosot menjadi negara berpendapatan menengah atas (USD 12.371/kapita), bahkan pada tahun 2021 jatuh ke dalam golongan negara berpendapatan menengah bawah (USD 1.627/kapita).

Pada tahun 1960 Indonesia bersama Korea Selatan, Thailand, India, dan Tiongkok termasuk kedalam kelompok negara berpendapatan rendah di bawah USD 1000/kapita, yaitu masing-masing mempunyai pendapatan per kapita sebesar USD 690, USD 932, USD 571, USD 330, dan USD 192 (Grafik 7b). Dari kelima negara tersebut hingga 60 tahun kemudian (2021) yang mampu lolos menjadi negara berpenghasilan tinggi hanya Korea Selatan, sedangkan keempat negara lainnya masih terjebak di dalam MIT dengan pendapatan per kapita masing-masing USD 3.893 (Indonesia), USD 6.124 (Thailand), USD 1.937 (India), dan USD 11.188 (Tiongkok). Adapun pendapatan per kapita Asia-Pasifik selama periode yang sama mengalami peningkatan dari USD 1.113 menjadi USD 11.741; sedangkan untuk dunia juga meningkat dari USD 3.733 menjadi USD 11.010.

Dengan demikian dalam mengupayakan suatu negara agar mampu keluar dari MIT merupakan tantangan dan perjuangan yang tidak mudah. Kita bisa belajar baik dari negara yang berhasil maupun yang gagal keluar dari MIT. Untuk itu minimal dibutuhkan suatu lingkungan kebijakan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi makro yang didukung oleh kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan pemerintah yang sensibel disertai dengan investasi yang mengandung teknologi baru dan kebijakan yang kondusif untuk inovasi.¹¹⁶ Keajaiban pertumbuhan di Asia Timur seperti Jepang, Korea, Taiwan, dan Hongkong semua terjadi karena adanya peningkatan ekspor produk-produk yang belum pernah diproduksi sebelumnya; dan keajaiban pertumbuhan yang berlangsung lama ini pasti melibatkan pengenalan terus-menerus akan produk-produk baru, tidak hanya melulu pembelajaran terus-menerus terhadap sekumpulan produk yang tetap.¹¹⁷

Agar dapat terlepas dari MIT, kebanyakan kajian menekankan pentingnya transformasi

¹¹³ Breda Griffith, Middle Income Trap, di dalam Raj Nallari et.al, *Frontiers in Development Policy*, Section 4, The World Bank, September 2011, hal. 39.

¹¹⁴ Michalski, B., Looking for evidence of the middle-income trap. The case of Polish trade in high-tech goods with Germany, *Post-Communist Economies*, 2018, hal. 405-420.

¹¹⁵ Eva Paus, *Ibid*, hal. 18.

¹¹⁶ Breda Griffith, *Ibid*, hal. 40

¹¹⁷ Lucas, R. E. (1988), On the Mechanics of Economic-Development, *Journal of Monetary Economics*, 22(1), hal. 34 dan 41.

struktural terhadap produksi dan kandungan ekspor suatu negara, dari aktivitas teknologi rendah kepada aktivitas teknologi yang lebih tinggi, dengan teknologi yang diproduksi dan dikembangkan sendiri berdasarkan inovasi sendiri ketimbang menjiplak dari negara lain.¹¹⁸ Untuk itu diperlukan kebijakan yang antara lain mampu mendukung dan mewujudkan faktor-faktor berikut¹¹⁹: (i) mengubah/meningkatkan keterampilan tenaga kerja dari berketerampilan rendah (yang hanya mampu menjiplak/imitasi) kepada tenaga kerja berketerampilan lebih tinggi (yang mampu berinovasi); (ii) melakukan perubahan dari kegiatan-kegiatan manufaktur berteknologi rendah (yang juga berproduktivitas rendah) kepada teknologi yang lebih maju/tinggi (yang berproduktivitas tinggi dan lebih canggih); (iii) melatih dan merekrut tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam bidang perancangan (*design*) untuk meningkatkan dan memperluas aktivitas inovasi; (iv) mendorong peningkatan aktivitas penelitian dan pengembangan, terutama untuk peningkatan produksi barang² inovatif berteknologi tinggi yang mampu menembus pasar ekspor dunia; (v) membangun infrastruktur canggih, khususnya di bidang perancangan untuk meningkatkan inovasi dan jaringan pengetahuan (*knowledge network*); serta (vi) memperbaiki penegakan peraturan hak kekayaan intelektual (khususnya dalam hal administrasi paten) dan menghilangkan rigiditas pasar tenaga kerja.

Perlu dipahami bahwa perlambatan pertumbuhan ekonomi kecil kemungkinannya terjadi di negara-negara yang penduduknya banyak yang berpendidikan SMA ke atas (*secondary and tertiary educations*) dan mempunyai produk-produk berteknologi tinggi yang berkontribusi besar dalam eksportnya sehingga mereka mampu terlepas dari MIT.¹²⁰ Argumen bahwa perbaikan pengetahuan (*knowledge*) adalah sumber utama dari pertumbuhan menjadi lebih meyakinkan bagi negara-negara berkembang sebagaimana Laporan Bank Dunia 1998-99 menekankan, apa yang membedakan antara negara-negara berkembang dan maju tidak hanya kesenjangan sumberdaya, namun juga kesenjangan dalam pengetahuan.¹²¹

Konvergensi kesenjangan antara negara maju dengan negara berkembang yang tidak dapat semakin dekat tergantung pada kebijakan dan pengaturan kelembagaan yang spesifik yang biasanya sulit diidentifikasi dan diterapkan serta diperlukan transformasi struktural yang tidak kolot (*unorthodox*) dari aktivitas-aktivitas yang berproduktivitas rendah kepada yang lebih tinggi dan lebih terdiversifikasi.¹²² Ketika suatu ekonomi/negara mampu mencapainya dan mulai menjadi produsen produk-produk yang berteknologi dan bernilai tambah tinggi, itulah jalan untuk naik kelas dan transformasi semacam ini tidak bisa dicapai oleh kekuatan pasar sendiri tanpa bantuan sehingga partisipasi aktif pemerintah sangat diperlukan.

Namun perlu dicermati bahwa menggantungkan pada PDB semata sebagai ukuran kesejahteraan sangatlah terbatas/sempit dan salah arah; penambahan ukuran multi-dimensi dibutuhkan, termasuk pembangunan manusia dan sumberdaya alam serta keberlanjutan lingkungan.¹²³ Untuk itu dalam upaya untuk terbebas dari MIT dan menjadi negara maju harus tetap berpegang pada upaya dan ukuran pembangunan multi-dimensi dengan melibatkan segenap unsur masyarakat sebagaimana telah dirumuskan di dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

¹¹⁸ Güzin Bayar. Escape From Middle Income Trap: An Export Structure Approach to the Case of Poland, *Argumenta Oeconomica*, No 2 (47) 2021, hal. 129

¹¹⁹ Pierre-Richard Agénor and Otaviano Canuto, Middle-Income Growth Traps, World Bank Policy Research Working Paper No. 6210, September 2012, hal. 24-27.

¹²⁰ Eichengreen, B., Donghyun, P., Kwanho, S., Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap, NBER Working Paper No. 18673, 2013. hal. 2.

¹²¹ Joseph E. Stiglitz, Rethinking Development Economics, *The World Bank Research Observer*, July 2011, hal. 230-234.

¹²² Rodrik, D, *Ibid*, hal. 3 dan 38.

¹²³ Vinod Thomas, Revisiting the Challenge of Development di dalam Gerald M. Meier and Joseph E. Stiglitz (eds.), *Frontiers of Development Economics: The Future in Perspective*, publikasi World Bank dan Oxford University Press, tahun 2001, hal. 149-182.

– TPB (*Sustainable Development Goals – SDGs*)¹²⁴ sehingga menjadi negara maju dan sejahtera yang terus tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan.

IV. Kesimpulan dan Rekomendasi

Mencermati uraian dari bab Pendahuluan, Refleksi, hingga Visi di atas serta situasi terkini dan kecenderungan di masa yang akan datang, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

- a) Agar terbebas dari MIT, strategi pembangunan harus berfokus penuh pada upaya sungguh-sungguh untuk mendorong kemampuan inovasi domestik melalui pembaharuan fokus pada kebijakan-kebijakan yang mendorong transformasi produktif bagi inovasi yang lebih luas di dalam sektor-sektor yang ada dan dukungan realokasi kepada sektor-sektor dengan produktivitas yang lebih tinggi, antara lain:
 - mengubah/meningkatkan keterampilan tenaga kerja dari berketerampilan rendah (yang hanya mampu menjiplak/imitasi) kepada tenaga kerja berketerampilan lebih tinggi (yang mampu berinovasi);
 - melakukan perubahan dari kegiatan-kegiatan manufaktur berteknologi rendah (yang juga berproduktivitas rendah) kepada teknologi yang lebih maju/tinggi (yang berproduktivitas tinggi dan lebih canggih) dan ramah lingkungan;
 - melatih dan merekrut tenaga kerja yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan dalam bidang perancangan (*design*) untuk meningkatkan dan memperluas aktivitas inovasi;
 - mendorong peningkatan aktivitas penelitian dan pengembangan beserta ekosistem pendukungnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (termasuk korporasi dan perguruan tinggi), terutama untuk peningkatan produksi barang² inovatif berbasis teknologi dan ramah lingkungan yang mampu menembus pasar ekspor dunia;
 - membangun infrastruktur canggih, khususnya di bidang perancangan untuk meningkatkan inovasi dan jaringan pengetahuan (*knowledge network*);
 - memperbaiki penegakan peraturan hak intelektual (khususnya dalam hal administrasi paten) dan menghilangkan rigiditas pasar tenaga kerja; serta
 - membangun sistem kelembagaan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas korupsi sebagai pendukung/prasyarat utamanya.
- b) Pembangunan sebagai transformasi masyarakat secara multi-dimensional tidak hanya untuk mencapai sasaran-sasaran SPB/SDGs saja, tetapi juga agar dapat terbebas dari

¹²⁴ Bappenas, Peta Jalan SDGs Indonesia: Menuju 2030, tahun 2019, hal. xii-xiii.

- MIT sehingga menjadi negara maju dan sejahtera lahir-batin yang terus tumbuh secara inklusif dan berkelanjutan (*advanced, inclusive, and sustainable economy/country*).
- c) Hilirisasi tidak hanya sekedar mengolah bahan baku menjadi barang antara atau barang jadi, tetapi menjadi barang baru berbasis teknologi dan inovasi yang juga ramah lingkungan menuju *Industry 4.0 (and beyond)*. Demikian juga ekspor yang harus didorong adalah produk-produk olahan (manufaktur) baru berbasis teknologi dan inovasi, ramah lingkungan, serta terdiversifikasi.
 - d) Hilirisasi tidak hanya sampai pada produk turunan pertama atau kedua saja, tetapi juga harus lebih mendalam dan terdiversifikasi sehingga membangun semacam jaringan “pohon industri” dengan pilihan cabang dan ranting yang paling bernilai tambah tinggi dan strategis sampai ke produk-produk akhir. Hilirisasi sekaligus juga pendalaman industri.
 - e) Pemerintah bersama para pemangku kepentingan harus berkolaborasi membangun sistem pendidikan yang berkualitas; selain membangun karakter yang kuat (berbudi pekerti luhur) dan inovatif sesuai dengan tuntutan perkembangan kedepan (terutama pesatnya perkembangan teknologi), namun juga memperkuat/meningkatkan kualitas pendidikan sains, matematika, dan membaca untuk pendidikan dasar atau SMA ke bawah (*secondary education*) serta meningkatkan kualitas dan memperluas program studi STEAM (*science, technology, engineering, arts, and mathematics*) untuk tingkat sarjana ke atas (*tertiary education*) dengan menerapkan praktik-praktik terbaik dunia yang disesuaikan dengan budaya dan kearifan lokal Indonesia/Nusantara sebagai jatidiri bangsa.

Daftar Pustaka

- Abhijit Sen Gupta, Determinants of Tax Revenue Efforts in Developing Countries, IMF Working Paper No. WP/07/184, July 2007
- Ahir, Bloom & Furcerri, The World Uncertainty Index, NBER Working Paper 29763, February 2022.
- Anders Isaksson, Determinants of Total Factor Productivity: A Literature Review, Research and Statistics Branch, United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), hal. 77-78. July 2007
- Bappenas, Diagnosis Pertumbuhan Indonesia: Prioritas Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, 2019.
- Bappenas, Diagnosis Pertumbuhan Indonesia: Prioritas Strategi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
- Bappenas, Evaluasi Akhir RPJMN 2015-2019, Oktober 2019

- Bappenas, Evaluasi RPJMN 2010-2014, Maret 2015 hal V-1
- Bappenas, Peta Jalan SDGs Indonesia: Menuju 2030, tahun 2019
- Bappenas, RKP 2023
- Bappenas, RPJMN 2005-2009.
- Bappenas, RPJMN 2010-2014.
- Bappenas, RPJMN 2010-2014
- Bayoumi et.al., Growth at Risks from Natural Disasters, IMF Working Paper, WP/21/234.
- BI, Laporan Neraca Pembayaran Indonesia Triwulan-IV tahun 2005 – 2009.
- BI, Laporan Perekonomian Indonesia (LPI) 2014, hal. xxxvii
- BI, Neraca Pembayaran Triwulan-IV 2014
- BKF Kemenkeu, Kajian Singkat Perkembangan Pasar Surat Utang Indonesia dan Peran Asian Bond Market Initiative (ABMI)
- Bloomberg, South Africa to Join BRIC to Boost Emerging Markets, 24 December 2010, <https://www.bloomberg.com/news/articles/2010-12-24/south-africa-asked-to-join-bric-to-boost-cooperation-with-emerging-markets>
- Boediono, Hidup di Tengah Krisis Ekonomi Dunia - FEB UGM, 30 Januari 2009, Dimuat pada majalah EBIZ Edisi 2 Tahun 2009, <https://feb.ugm.ac.id/id/penelitian/artikel-dosen/819-hidup-di-tengah-krisis-ekonomi-dunia>
- BPS, BRS No. 01 / IX / 2 Januari 200, hal. 1 dan No. 01/01/Th. XII, 5 Januari 2009.
- BPS, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan, 1970-2017
- BPS, Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2022, BRS No. 01/01/Th. XXVI, Jan-2023
- Breda Griffith, Middle Income Trap, di dalam Raj Nallari et.al, Frontiers in Development Policy, Section 4, The World Bank, September 2011
- Britannica, Russia-Ukraine War (2022–present), <https://www.britannica.com/event/2022-Russian-invasion-of-Ukraine>
- Craig Burnside, An Introduction to Fiscal Sustainability in Theory and Practice, di dalam “Fiscal Sustainability in Theory and Practice – A Handbook”, World Bank, 2005
- Dani Rodrik, The Future of Economic Convergence, NBER Working Paper No.17400, Sep-2011. Knowledge@Wharton, "Victimizing the Borrowers: Predatory Lending's Role in the Subprime Mortgage Crisis", February 20, 2008, <https://knowledge.wharton.upenn.edu/article/victimizing-the-borrowers-predatory-lendings-role-in-the-subprime-mortgage-crisis/>
- Data 25 tahun indeks dolar di Trading Economics (DXY Dollar Index <https://tradingeconomics.com/dxy:cur>)
- DPR-RI, “Capaian Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Di Indonesia”, Laporan Kajian Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN DPR-RI, 2014
- ECB, A tale of three crises: synergies between ECB tasks, ECB Occasional Paper Series No 305 / September 2022, hal.14.
- Edmund Ho dan Cheung Ho, Foreign participation in local currency government bond markets in emerging Asia: Benefits and pitfalls to market stability, Journal of International Money

- and Finance, Volume 128, November 2022, 102699, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0261560622001024>
- Eichengreen, B., Donghyun, P., Kwanho, S., Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the
Eva Paus, Escaping the Middle-Income Trap: Innovate or Perish, ADB Institute, Working Paper
685, March 2017
- Güzin Bayar. Escape From Middle Income Trap: An Export Structure Approach to the Case of
Poland, *Argumenta Oeconomica*, No 2 (47) 2021
- Hong Kong Monetary Authority, The double-edged sword of foreign participation in local
currency government bond markets, Research Memorandum 14/2019, 27 November
2019, hal. 27; dan Foreign participation in the local currency bond markets of emerging
market economies: good or bad for market resilience and financial stability? BIS papers
No.113, December 2020
- [https://karangampel.indramayukab.go.id/musyawarah-perencanaan-pembangunan-desa-
musrenbangdes-dukuh-jeruk-tahun-2024/](https://karangampel.indramayukab.go.id/musyawarah-perencanaan-pembangunan-desa-musrenbangdes-dukuh-jeruk-tahun-2024/)
- [https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-03/indonesia-reclaims-upper-middle-
income-rank-on-post-covid-growth#xj4y7vzkg](https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-07-03/indonesia-reclaims-upper-middle-income-rank-on-post-covid-growth#xj4y7vzkg)
- [https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-
penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html](https://www.bps.go.id/statictable/2014/01/30/1494/jumlah-penduduk-miskin-persentase-penduduk-miskin-dan-garis-kemiskinan-1970-2017.html)
- [https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/02/indonesia-now-upper-middle-income-
country-world-bank-says.html](https://www.thejakartapost.com/news/2020/07/02/indonesia-now-upper-middle-income-country-world-bank-says.html)
- IMD, World Competitiveness Booklet 2023
- IMF Blog, April 15, 2022 ([https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/04/15/global-
economic-uncertainty-surgings-amid-war-may-slow-growth](https://www.imf.org/en/Blogs/Articles/2022/04/15/global-economic-uncertainty-surgings-amid-war-may-slow-growth)).
- IMF, Fiscal Monitor April 2023 Update.
- IMF, Fiscal Monitor, October 2015
- IMF, Global Price Index of All Commodities [PALLFNFINDEXQ], retrieved from FRED,
Federal Reserve Bank of St. Louis;
<https://fred.stlouisfed.org/series/PALLFNFINDEXQ>, August 7, 2023.
- IMF, Global price of Energy index [PNRGINDEXM], retrieved from FRED, Federal Reserve
Bank of St. Louis; <https://fred.stlouisfed.org/series/PNRGINDEXM>, August 12, 2023.
- IMF, Unconventional Monetary Policies—Recent Experience And Prospects, April 18, 2013
- IMF, World Economic Outlook: Rebalancing Growth, April 2010.
- IMF, World Economic Outlook: The Great Lockdown, , Update April 2020.
- Indermit Gill and Homi Kharas, An East Asian Renaissance: Ideas for Economic Growth, The
World Bank, 2007
- Indermit Gill dan Brian Pinto, Public Debt in Developing Countries: Has The Market-Based
Model Worked?, World Bank Policy Research Working Paper No.3674, August 2005
- Indonesia now upper middle-income country, World Bank says - Business - The Jakarta Post,
July 2, 2020,
- Indonesia Regains Upper-Middle Income Rank on Growth Rebound – Bloomberg, July 3, 2023
- International Institute for Management Development (IMD), World Competitiveness Booklet

2023

- International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries, April 2021.
- Jim O'Neill, Building Better Global Economic BRICs, Goldman Sachs Global Economics Paper No: 66, 30th November 2001
- Joseph E. Stiglitz (2002). Globalisation and Its Discontents
- Joseph E. Stiglitz, Rethinking Development Economics, The World Bank Research Observer, July 2011 Vinod Thomas, Revisiting the Challenge of Development di dalam Gerald M. Meier and Joseph E. Stiglitz (eds.), *Frontiers of Development Economics: The Future in Perspective*, publikasi World Bank dan Oxford University Press, tahun 2001
- Joseph Stiglitz, 1998. "Towards A New Paradigm for Development", 9th Raúl Prebisch Lecture, United Nations Conference On Trade And Development (UNCTAD)
- Kemen ESDM, Reformasi Subsidi Energi: Belanja Jadi Lebih Produktif, <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/reformasi-subsidi-energi-belanja-jadi-lebih-produktif>
- Kemenkeu, APBN Kita: Kaleidoskop 2022
- Kemenko Perekonomian RI, Sukses Tekan Inflasi 2019, Pemerintah dan BI Lanjutkan Sinergi Melalui TPIP, Siaran Pers No. HM.4.6/21/SET.M.EKON.2.3/02/2020, 13 Februari 2020, <https://ekon.go.id/publikasi/detail/122/sukses-tekan-inflasi-2019-pemerintah-dan-bi-lanjutkan-sinergi-melalui-tpip>
- Kemenko Perekonomian, Realisasi Anggaran PC-PEN 2020-2022, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230126/9/1621743/airlangga-realisis-anggaran-pc-pen-2022-rp4145-triliun>
- Kemenko Perekonomian, Vaksinasi Covid-19 di Indonesia, 2022
- Kementerian Perdagangan RI, <https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/mantul-neraca-perdagangan-surplus-32-bulan-berturut>
- Kiki Verico, What has been happening to Indonesia's Manufacturing Industry? LPEM-FEB UI Working Paper 058, March 2021
- Kompas, Sejarah Kenaikan BBM dari Era Soekarno hingga Jokowi, 7 September 2022, <https://www.kompas.com/stori/read/2022/09/07/140000479/sejarah-kenaikan-bbm-dari-era-soekarno-hingga-jokowi>
- Lucas, R. E. (1988), On the Mechanics of Economic-Development, *Journal of Monetary Economics*,
- Michalski, B., Looking for evidence of the middle-income trap. The case of Polish trade in high-tech goods with Germany, *Post-Communist Economies*, 2018
- Middle-Income Trap, NBER Working Paper No. 18673, 2013.
- MORGAN STANLEY PRESENTS: "The Fragile Five' — The Most Troubled Currencies In Emerging Markets", <https://www.businessinsider.com/morgan-stanley-fragile-5-emerging-markets-2013-9> dan juga "Fragile five' countries face taper crunch", *Financial Times (FT) reporters*, December 18, 2013, <https://www.ft.com/content/407c42ac-6703-11e3-a5f9-00144feabdc0>
- Morgan Stanley Research Report "FX Pulse", 2013.

<http://www.morganstanleyfa.com/public/projectfiles/dce4d168-15f9-4245-9605-e37e2caf114c.pdf>

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Dukuh Jeruk 2024 – Kec. Karangampel

OECD, Revenue Statistics in Asia & the Pacific 2023 — Indonesia, Key findings for Indonesia, <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>

Paul Cashin, et.al, Fair Weather or Foul? The Macroeconomic Effects of El Niño, IMF Working Paper, WP/15/89.

Peraturan Presiden No.82 Tahun 2020 tentang Komite Penangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Perry Warjiyo dan Solikin Juhro, Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses, Handbook of Central Banking Studies, BI Institute 2022

Pierre-Richard Agénor and Otaviano Canuto, Middle-Income Growth Traps, World Bank Policy Research Working Paper No. 6210, September 2012

Reuters, From fragile five to troubled trio, March 11, 2015, <https://www.reuters.com/article/emerging-fragile-idINKBN0M71BC20150311>

Schwab, The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, 2016

Sekretariat Kabinet RI, 16 Januari 2023, <https://setkab.go.id/konsolidasi-fiskal-cepat-airlangga-defisit-apbn-lebih-rendah-dari-target/>

Sekretariat Kabinet RI, Sambutan Presiden RI Pada Rakornas VI Tim Pengendalian Inflasi Derah 2015, <https://setkab.go.id/sambutan-presiden-ri-pada-rakornas-vi-tim-pengendalian-inflasi-derah-2015-di-hotel-grand-sahid-jaya-jakarta-27-mei-2015/>

Solikin M. Juhro, Central Bank Policy Mix @Next Level: Memperkuat Strategi Kebijakan Pemulihan Ekonomi, Mengawal Era Kenormalan Baru, BI Institute Open Lecture Series 29, September 2020

The ASEAN Secretariat, ASEAN Statistical Yearbook 2022

U.S. Energy Information Administration (EIA), Crude Oil Prices: Brent - Europe [DCOILBRENTU], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; <https://fred.stlouisfed.org/series/DCOILBRENTU>, August 7, 2023.

Undang-undang No. 17 tahun 2007

Undang-undang No.2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional”

UNESCAP: <https://sdghelpdesk.unescap.org/e-library/shifting-quantity-quality-growth-equality-efficiency-sustainability-and-dynamism>

UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada Penjelasan Pasal 12 ayat 3 menyebutkan bahwa defisit anggaran dibatasi maksimal 3 persen dan utang maksimal 60 persen dari produk domestik bruto (PDB).

UU No.25 tentang SPPN serta berbagai sumber/dokumen RPJPN/D, RPJMN/D, RKP/D, dan

sebagainya.

UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Penjelasan.

UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 171 ayat (1) dan ayat (2), namun telah dianulir/dihapus oleh UU No. 17 Tahun 2023.

UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1)

Weicheng Lian, Natural Disasters & Scarring Effects, IMF Working paper No. WP/22/253, Decemberr 2022.

WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020, <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-covid-19---11-march-2020>

World Bank, Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security, May 9 2023

World Bank, Inflation, consumer prices for Indonesia [FPCPITOTLZGIDN], retrieved from FRED, Federal Reserve Bank of St. Louis; <https://fred.stlouisfed.org/series/FPCPITOTLZGIDN>, August 18, 2023.

World Bank, New country classifications by income level: 2019-2020, <https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-classifications-income-level-2019-2020>

World Bank, 1998. "Assessing Aid: What Works, What Doesn't, And Why".

World Bank. "Beyond Economic Growth 2nd ed". 2004.

WSJ, Net Imports Threaten Indonesia's OPEC Spot, <https://www.wsj.com/articles/SB108481829443413528>